ISSN 2962-4177

PENJARINGAN ASPIRASI INKLUSIF

FORUM KONSULTASI PUBLIK **RKPD** 2026

INOVASI BUSAK PAUD

LENSA PEMBANGUNAN

BULETIN

EDISI 1 JANUARI - MARET 2025

MENYONGSONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : TANTANGAN DAN STRATEGI



SCAN ME

ISSN 2962-4177



OFFICIAL SOCIAL MEDIA

BAPPEDA DAN LITBANG

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

bappedalitbang_kaltara

bappedadanlitbangprov_kalimantanutara

bappeda&litbangprovkaltara

bappedalitbang_kaltaraprov.go.id

TAJUK

Seraya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan kehendak-Nya, Buletin Lensa Pembangunan Edisi 18 ini bisa tersaji di hadapan Anda, para pembaca budiman. Di edisi perdana tahun 2025, dengan semangat baru, Buletin Lensa Pembangunan akan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perencanaan dan inovasi daerah di Kalimantan Utara serta berbagai informasi lainnya yang sayang untuk dilewatkan.

Edisi kali ini lensa Pembangunan hadir dengan topik utama Menyongsong Pembangunan Berkelanjutan : Tantangan dan Strategi. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan ekosistem. Sangat penting untuk memahami konsep, prinsip, dan implementasi pembangunan berkelanjutan.

Tidak ketinggalan, redaksi akan menyajikan beberapa liputan kegiatan seperti Konsultasi Publik RKPD 2026, Forum Penjaringan Aspirasi Mentari, serta Sosialisasi RIPJ - PID Tahun 2025 - 2029.

Jangan lewatkan pula artikel inovasi derah serta rubrik baru yaitu rubrik *quick policy* dan rubrik lingkungan yang akan membuka wawasan baru bagi pembaca sekalian.

Akhir kata, semoga buletin ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.
Selamat membaca.



Mochamad Sarkawi, S.Hut.M.Eng
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

LENSA PEMBANGUNAN

PENGARAH

Gubernur Kalimantan Utara
Wakil Gubernur Kalimantan Utara

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

PENASEHAT REDAKSI

Kepala Bappeda dan Litbang
Provinsi Kalimantan Utara

PEMIMPIN REDAKSI

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

EDITOR

Linda Marlisa

PENULIS ARTIKEL

Maimunah, Nuraini Asri, Ida Ayu Parlina,
Retno Sawitri, Romih, Cici Tri Yulita, Ady Setiawan,
Noor Aisyah Ranny, Muhammad Irfan Rifaldi,
Novieka Fitriani

DESIGN GRAFIS

Cristove Dismond, Ady Setiawan

SEKRETARIAT

Muhammad Roja Fajari R, Puput Islamitha Lukman,
Dewi Erisna Utami

ALAMAT REDAKSI

Jl. Agathis, Gedung PUPR-PERKIM LT. 4
Tanjung Selor - Kalimantan Utara



BULETIN LENSA PEMBANGUNAN

DAFTAR ISI

TOPIK UTAMA

MENYONGSONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : TANTANGAN DAN STRATEGI 6
EFISIENSI ANGGARAN DAN PEMBENTUKAN DANANTARA 10
STRATEGI MENJAGA STABILITAS EKONOMI DI TENGAH TEKANAN INFLASI 14

LIPUTAN KEGIATAN

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF, KALTARA GELAR FORUM PENJARINGAN ASPIRASI MENTARI 16
RAKORTEKRENBANG 2025 : PENYELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN 19
FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD 2026 20

FORUM PERANGKAT DAERAH RKPD 2026 SUKSES DIGELAR 22
DUKUNG SWASEMBADA PANGAN KALTARA LAKUKAN LANGKAH PERCEPATAN 23
SOSIALISASI RIPJ-PID 2025-2029 24

KALTARA JALIN KERJA SAMA DENGAN IPB MELALUI PROGRAM BEASISWA UMUM DAERAH 26
FINALISASI PENGISIAN DATA PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL 28
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH MELALUI KOLABORASI RISET 29

SEKILAS INFO

INFORMASI SINGKAT BAPPEDA DAN LITBANG 30

LINGKUNGAN

LANGKAH BERSAMA MENUJU PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT LESTARI 32

QUICK POLICY

MENYONGSONG KALTARA EMAS ATAU KALTARA CEMAS 34
ANAK TIDAK SEKOLAH DI KALIMANTAN UTARA 38
PENYUSUNAN POLICY PAPER SEBAGAI SYARAT HASIL KERJA MINIMAL 42

INOVASI DAERAH

LAYANAN SIPLAKU PENANAMAN MODAL DALAM GENGGAMAN 44
BUSAK PAUD: IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI TANA TIDUNG 46
STRATEGI DIGITALISASI DATABASE POTENSI PAJAK DAERAH DENGAN KOLABORASI INFORMASI GEOGRAFIS 48

POTRET RUANG

KEBUN RAYA: MASA DEPAN RUANG HIJAU, KONSERVASI DALAM EKSPANSI PEMBANGUNAN 50

JELAJAH

AIR TERJUN BINUSAN : WISATA MENYEJUKKAN DI NUNUKAN 55

MUATAN LOKAL

TAMBANGAN 58



MENYONGSONG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN : TANTANGAN DAN STRATEGI

Penting untuk memahami konsep, prinsip, dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Konsep Pembangunan Berkelanjutan pertama kali didefinisikan secara luas dalam laporan Brundtland *(Our Common Future)* yang diterbitkan oleh komisi dunia untuk lingkungan dan pembangunan (WCED) pada tahun 1987.

Pada dasarnya Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang ada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan yang akan mendatang. Tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar pembangunan dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merusak sumber daya alam dan ekosistem. Tiga pilar utama Pembangunan Berkelanjutan yaitu:

Ekonomi – Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meningkatkan inovasi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan.

Sosial – Menjamin kesejahteraan sosial, termasuk keadilan, hak asasi manusia, dan akses yang setara terhadap sumber daya. Meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya saing serta tahan terhadap perubahan.

Lingkungan – Melindungi dan melestarikan lingkungan agar tetap dapat mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengurangi emisi karbon dan dampak perubahan iklim. Mengelola sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari. Mencegah pencemaran dan degradasi lingkungan. Melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alami.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan juga sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dipertegas dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang mencakup berbagai aspek pembangunan.

Berikut ini adalah contoh Implementasi Pembangunan Berkelanjutan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, dimana berbagai sektor telah menerapkan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan dan sosial, seperti:

Sektor Energi Penggunaan energi terbarukan (seperti tenaga surya, arus air sungai, dan angin) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pengelolaan limbah dan daur ulang untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan hemat energi.

Sektor Pertanian menerapkan pertanian organik untuk mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya. Mengembangkan pertanian berkelanjutan dengan metode irigasi yang efisien. Menggunakan Teknologi yang mendukung efisiensi dan hemat energi.

Sektor Transportasi Menggunakan kendaraan listrik atau berbahan bakar ramah lingkungan. Mengembangkan transportasi umum untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Menerapkan konsep *smart city* yang ramah terhadap pejalan kaki dan pesepeda.

Sektor Industri Menerapkan prinsip ekonomi sirkular, yaitu mendaur ulang bahan baku dan mengurangi limbah. Mengembangkan produk ramah lingkungan dengan bahan yang bisa terurai atau didaur ulang. Mewujudkan Industri yang bersumber dari *Energi Zero Emission.*

Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup Program reboisasi dan penghijauan untuk mencegah deforestasi. Pengelolaan sampah yang lebih baik melalui program 3R *(Reduce, Reuse, Recycle).*

Tantangan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Implementasi pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan, antara lain kurangnya kesadaran dan komitmen serta masih banyaknya pihak yang mengutamakan keuntungan jangka pendek tanpa memperhatikan dampak lingkungan.

Selanjutnya adalah ketimpangan sosial dan ekonomi, perbedaan akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan teknologi membuat pembangunan tidak merata. Kemudian perubahan iklim dan bencana alam termasuk pemanasan global serta perubahan pola cuaca dapat menghambat berbagai aspek pembangunan. Pengelolaan sumber daya yang buruk, eksploitasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat diperbaiki.

Secara garis besar pembangunan berkelanjutan adalah konsep penting yang bertujuan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Melalui implementasi berbagai kebijakan dan teknologi ramah lingkungan, pembangunan berkelanjutan dapat membantu menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan sehat bagi generasi saat ini dan mendatang.



Namun, tantangan yang ada harus diatasi dengan komitmen global, kesadaran masyarakat, dan kebijakan yang tepat. Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan program nasional, salah satunya adalah AstaCita.

AstaCita merupakan delapan cita-cita pembangunan nasional yang menjadi bagian dari visi Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KALTARA

Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian utara Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah serta potensi besar untuk pembangunan. Namun, provinsi ini juga menghadapi tantangan besar terkait keberlanjutan pembangunan karena kerentanannya terhadap perubahan iklim, deforestasi, dan ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara menjadi prioritas, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Potensi Sumber Daya Alam di Kalimantan Utara

Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor mineral, energi, pertanian, dan perikanan, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kaltara dikenal kaya akan mineral, minyak bumi dan batubara yang telah menjadi sektor penting dalam perekonomian daerah.

Namun, pengelolaan sektor ini memerlukan perhatian besar agar dampak lingkungan bisa diminimalisir melalui prinsip keberlanjutan. Selanjutnya adalah energi baru dan terbarukan, Kalimantan Utara memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan, seperti tenaga air, angin, dan surya.

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini dapat mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil. Kalimantan Utara kaya akan sektor pertanian dan kehutanan terutama produk hortikultura, kelapa sawit, dan karet, serta potensi kehutanan untuk reboisasi dan konservasi menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan yang tetap berpegang pada konsep ekonomi hijau.

Disamping itu Kalimantan Utara juga memiliki garis pantai yang panjang, serta potensi perikanan yang besar, yang dapat dikelola dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Utara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah merancang beberapa strategi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan mengutamakan tiga pilar dasar yaitu, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Beberapa strategi dan inisiatif yang dijalankan berupa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan antara lain pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti batubara dan mineral, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan, seperti reklamasi lahan pasca pertambangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

Penerapan prinsip tambang berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal juga menjadi prioritas. Kemudian penting untuk di *highlight* tentang kebijakan kehutanan berkelanjutan. Kalimantan Utara memiliki kawasan hutan yang cukup luas, sehingga kebijakan pengelolaan hutan yang berkelanjutan sangat penting.

Pemerintah daerah telah mempromosikan program reboisasi, konservasi hutan, serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk mencegah deforestasi dan menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya pemanfaatan energi terbarukan di Provinsi Kalimantan Utara berpotensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di beberapa daerah dengan sungai yang besar dan berpotensi untuk pembangkit tenaga angin dan surya.

Pemerintah daerah mendorong pembangunan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mencegah polusi. Peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengentasan kemiskinan melaui pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, infrastruktur yang baik dan konektivitas antar daerah menjadi sangat penting.

Kalimantan Utara mengembangkan sistem transportasi yang mendukung mobilitas barang dan orang, serta menghubungkan daerah-daerah terpencil ke pusat ekonomi. Kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal membentuk fokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal dan keberlanjutan.





Program penguatan UMKM dan koperasi lokal menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kaltara untuk menciptakan sumber daya manusia yang lebih baik dan dapat berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya pengelolaan sampah dan polusi, pemerintah daerah juga mendorong pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui program daur ulang dan mengurangi penggunaan plastik. Penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah dan limbah menjadi salah satu program yang mendukung pembangunan berkelanjutan.



Terakhir program-program pelestarian keanekaragaman hayati dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi flora dan fauna di daerah-daerah yang rawan terhadap perusakan ekosistem, seperti kawasan hutan dan laut.

Tantangan dan Hambatan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Utara

Walaupun Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, antara lain deforestasi dan kerusakan lingkungan, eksploitasi hutan dan area untuk kegiatan industri, serta perluasan lahan kelapa sawit yang tidak bertanggung jawab, termasuk pertambangan dan perkebunan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan hayati. Penyediaan Infrastruktur yang tidak merata, beberapa daerah di Kalimantan Utara masih terisolasi dengan akses terbatas ke infrastruktur dasar seperti transportasi, jalan, air bersih, dan listrik.

Ketergantungan pada sumber daya alam juga menjadi masalah yang serius, Kalimantan Utara masih sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, yang bisa menyebabkan kerusakan jika tidak dikelola dengan bijaksana. Terakhir, tantangan sosial dan ekonomi meskipun ada kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, ketimpangan sosial antara daerah pusat dan daerah terpencil masih menjadi tantangan besar.



Inisiatif dan Proyek Pembangunan Berkelanjutan di Kalimantan Utara

Untuk menghadapi tantangan tersebut, beberapa proyek dan inisiatif yang sedang dilaksanakan atau direncanakan di Kalimantan Utara antara lain, program pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, pembangunan infrastruktur hijau seperti jalan, pelabuhan, dan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Pemberdayaan masyarakat berbasis ekowisata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam secara berkelanjutan. Program penanaman pohon dan konservasi hutan untuk menjaga kualitas udara dan keseimbangan ekosistem.

Pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Utara memerlukan pendekatan yang seimbang antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun ada banyak tantangan, dengan kebijakan yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Kalimantan Utara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. (IR)



EFISIENSI ANGGARAN DAN PEMBENTUKAN DANANTARA

LANGKAH STRATEGIS PRESIDEN UNTUK PEMBANGUNAN NASIONAL

(SUMBER) Antara Foto

Dalam upaya memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah berani dengan melakukan pemangkasan dan efisiensi anggaran di berbagai sektor pemerintahan.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana publik, tetapi juga untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif guna mendukung program-program prioritas nasional. Salah satu inisiatif utama yang didanai dari hasil efisiensi ini adalah pembentukan Danantara, sebuah lembaga strategis yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Latar Belakang Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pres-

iden Prabowo bukanlah langkah sembarangan. Kebijakan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi belanja negara. Beberapa sektor yang mengalami penyesuaian anggaran antara lain:

Pertama, Belanja Operasional: Pengurangan anggaran untuk kegiatan yang dinilai kurang produktif atau memiliki duplikasi program.

Kedua, Proyek-proyek yang Tidak Prioritas: Menunda atau mengalihkan dana dari proyek-proyek yang tidak mendesak atau kurang berdampak langsung pada masyarakat.

Ketiga, Efisiensi Birokrasi: Mengoptimalkan proses administrasi dan mengurangi pemborosan dalam pengelolaan anggaran.

Langkah ini diambil dengan prinsip "tepat guna, tepat sasaran", sehingga dana yang tersedia dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih berdampak luas.

Strategi Pemangkasan Anggaran

Pemangkasan anggaran dilakukan dalam tiga tahap:

Putaran pertama, Pemerintah menghemat Rp300 triliun melalui penyisiran anggaran di Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga (K/L).

Putaran kedua: Efisiensi anggaran ditargetkan Rp308 triliun, namun Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi, sehingga efisiensi bersih menjadi Rp250 triliun.

Dan terakhir putaran ketiga, Penghematan melalui dividen BUMN dengan target Rp300 triliun. Dari jumlah ini, Rp200 triliun digunakan untuk negara dan Rp100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja

Kementerian Keuangan mengimplementasikan upaya efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun pada 2025. Selain itu, pemangkasan atas anggaran belanja negara juga diberlakukan terhadap transfer ke daerah, dengan nilai lebih dari Rp50,59 triliun. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)



dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, serta dipertegas oleh Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati paling pertengahan Februari 2025

Berikut beberapa kementerian yang terkena efisiensi anggaran pada 2025:

- Kementerian Keuangan: Rp. 12,3 triliun
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Rp. 8,01 triliun
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN): Rp. 2,631 triliun
- Kementerian Pekerjaan Umum: Rp. 81 triliun
- Kementerian Pemuda dan Olahraga: Rp. 1,4 triliun
- Kementerian Dalam Negeri: Rp. 2,75 triliun
- Kementerian Agama: Rp. 14,28 triliun
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp. 4,49 triliun
- Kementerian Kesehatan: Rp. 19,63 Triliun

- Kementerian Perhubungan: Rp. 17,87 Triliun
- Kementerian Pertanian: Rp. 10,28 Triliun

Tujuan Pembentukan Danantara

Danantara, atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dibentuk oleh Presiden Prabowo dengan tujuan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara melalui investasi strategis. Danantara akan mengelola aset dan dividen BUMN, yang sebelumnya masuk ke APBN, untuk diinvestasikan dalam sektor berkelanjutan seperti energi terbarukan, industri hilir, dan manufaktur canggih. Selain itu, Danantara diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional dan membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%, dirancang untuk menjadi katalisator pembangunan nasional. Tujuan utama Danantara adalah:

Pertama, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi terbarukan, dan teknologi.

Kedua, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Dengan fokus pada program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang inklusif.

Ketiga, Memperkuat Ketahanan Nasional: Melalui penguatan sektor pertahanan, pangan, dan energi.

Dari total efisiensi anggaran, Presiden Prabowo menegaskan bahwa sekitar US$20 miliar (Rp326,6 triliun) akan dialokasikan ke Danantara. Dana ini bertujuan untuk memperkuat investasi strategis yang mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu, sekitar US$24 miliar (Rp392 triliun) digunakan untuk program makan bergizi gratis bagi masyarakat, guna mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia

Dengan kebijakan ini, Prabowo berharap anggaran negara digunakan lebih efisien dan tepat sasaran, sekaligus memastikan bahwa program-program prioritas pemerintah dapat berjalan dengan optimal demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.



Dampak Positif bagi Masyarakat

Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan, antara lain:

- Pengurangan Ketimpangan: Dengan mengalokasikan dana untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Proyek-proyek strategis yang dijalankan Danantara akan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

Tantangan dan Harapan

Meskipun kebijakan ini menuai apresiasi, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah memastikan bahwa proses pemangkasan anggaran tidak mengganggu layanan publik yang esensial. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Danantara harus dijaga agar kepercayaan publik tetap tinggi.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmennya untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan lebih bijak untuk kemakmuran rakyat. (RSL)



"LAKUKANLAH YANG TERBAIK UNTUK MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT "

DR. H. ZAINAL A. PALIWANG, S.H., M.HUM



Strategi Menjaga Stabilitas Ekonomi di Tengah Tekanan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kondisi perekonomian suatu daerah. Di Provinsi Kalimantan Utara. Inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika nasional dan global, tetapi juga oleh karakteristik geografis, struktur ekonomi, dan faktor distribusi barang. Memahami tantangan serta merumuskan strategi yang tepat menjadi kunci bagi Pemerintah Provinsi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai beranda depan Indonesia tentu saja terdapat tantangan yang berbeda dari daerah lainnya. Pertama, Kaltara masih sangat bergantung terhadap pasokan dari luar daerah. Sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Kaltara, seperti beras, sayuran, hingga barang kebutuhan industri, masih bergantung pada pasokan dari provinsi lain. Ketergantungan ini membuat Kaltara rentan terhadap gangguan distribusi, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem atau kenaikan biaya logistik.

Kedua, tingginya biaya transportasi dan logistik dikarenakan Kaltara sebagai provinsi perbatasan dengan infrastruktur yang masih terus berkembang, biaya transportasi antarwilayah di Kaltara relatif tinggi. Kondisi ini mendorong kenaikan harga barang dan jasa yang berdampak langsung terhadap inflasi.

Ketiga, terdapat fluktuasi harga komoditas lokal. Kaltara memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun, produksi komoditas lokal yang belum stabil sering menyebabkan fluktuasi harga di pasar, memperparah tekanan inflasi musiman.

Keempat tidak dapat dipungkiri, sebagai derah perbatasan tentu saja Kaltara terpengaruh oleh dampak eksternal global. Sebagai bagian dari perekonomian global, Kaltara juga terdampak oleh fluktuasi harga energi dunia, nilai tukar rupiah, dan kebijakan perdagangan internasional, khususnya mengingat kedekatannya dengan negara tetangga seperti Malaysia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut tentu saja dibutuhkan Langkah-langkah strategis dalam menghadapi inflasi di kalimantan utara. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas inflasi di Kaltara, antara lain melalui penguatan ketahanan pangan lokal dengan meningkatkan produksi pangan lokal melalui program pemberdayaan petani, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, serta pengembangan kawasan perta-

nian berbasis korporasi menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

Kemudian tentu saja dengan pengembangan infrastruktur logistik. Pemerintah Provinsi perlu terus mendorong pembangunan jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi lainnya. Peningkatan konektivitas antarwilayah akan menekan biaya distribusi barang dan jasa, sehingga membantu mengendalikan harga.

Selain itu, Peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus lebih aktif dalam melakukan pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menyelenggarakan operasi pasar secara tepat waktu di daerah-daerah rawan inflasi. Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan mengingat Kaltara masih mengandalkan sektor primer, seperti sektor pertambangan dan penggalian dan sektor pertanian dalam arti luas.

Kaltara perlu mengembangkan sektor industri pengolahan dan jasa, termasuk pariwisata dan perdagangan lintas batas, guna memperluas basis ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu. Terakhir, tentu saja perlu peningkatan literasi keuangan dan ekonomi kepada masyarakat untuk mengarahkan pola konsumsi yang lebih bijak, mengurangi *panic buying,* serta memperkuat daya tahan masyarakat terhadap gejolak harga.

Menghadapi tantangan inflasi di Kalimantan Utara memerlukan upaya kolektif yang terintegrasi, mulai dari sektor pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat. Dengan strategi yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, Kaltara dapat menjaga stabilitas harga, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, sebagai motor perencanaan pembangunan, berperan penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan inovasi untuk mengantisipasi serta mengelola dinamika inflasi di masa depan. (NAR)



QUICK FACTS:
INFLASI DI KALIMANTAN UTARA

01 | *Ketergantungan Pasokan*
> 60% bahan pokok dipasok dari luar provinsi.

02 | *Kontribusi Transportasi*
Biaya logistik berkontribusi signifikan terhadap kenaikan harga barang.

03 | *Komoditas Rawan Inflasi*
Beras, cabai, bawang merah, dan ikan segar.

04 | *Peran TPID*
Tim Pengendalian Inflasi Daerah aktif dalam pemantauan dan intervensi pasar.

05 | *Konektivitas*
Proyek infrastruktur strategis (jalan, pelabuhan) terus dikembangkan untuk mendukung distribusi barang.





Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama program SKALA menyelenggarakan Forum Penjaringan Aspirasi Inklusif-MENTARI KALTARA (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusi) di Gedung Gabungan Dinas, Kamis (20/3).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Suara yang Selama Ini Terpinggirkan Kini Didengar

Forum MENTARI KALTARA tidak hanya sekadar acara seremonial belaka. Ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan kelompok marginal dalam setiap tahap pembangunan. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Ingkong Ala dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan secara resmi, menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus mencakup semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. "Kami tidak ingin ada lagi warga kami yang merasa terabaikan. Setiap suara penting, terutama dari mereka yang selama ini seringkali tidak terdengar," ujarnya dengan penuh semangat.

“Saya juga ingin mengajak semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun akademisi, untuk terus bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan”, tambah Ingkong dalam sambutannya. Peserta kegiatan ini terdiri dari perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai elemen Jaringan Masyarakat Sipil yang terdiri dari perwakilan disabilitas, perempuan, anak, lansia, kaum rentan dan komunitas adat terpencil yang masing-masing kelompok secara bergantian





MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF, KALTARA GELAR FORUM PENJARINGAN ASPIRASI MENTARI

menyampaikan usulan aspirasinya.

Dari Aspirasi Menuju Aksi Nyata

Forum ini menghasilkan berbagai masukan berharga yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Beberapa usulan yang telah melalui proses verifikasi sejak uji coba forum pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang menggembirakan, di antaranya adalah program peningkatan akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan penerimaan tenaga kerja di pemerintahan untuk penyandang disabilitas.

Kelompok anak menyuarakan pentingnya pendidikan inklusif dan penyediaan ruang bermain yang ramah bagi anak-anak dengan disabilitas. Sementara itu, perwakilan perempuan menekankan kebutuhan akan layanan kesehatan reproduksi yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah provinsi. Penyandang disabilitas mengajukan usulan konkret terkait pembangunan infrastruktur yang aksesibel serta program pelatihan kerja yang inklusif.

Masyarakat adat tidak ketinggalan menyampaikan aspirasi mereka mengenai perlindungan hak atas tanah dan sumber daya alam yang selama ini menjadi isu krusial di Kalimantan Utara. Lansia juga mendapat kesempatan untuk menyuarakan kebutuhan mereka akan program jaminan sosial yang lebih komprehensif dan pusat kegiatan khusus yang dapat meningkatkan kualitas hidup di usia senja.

Kolaborasi Multi-Pihak untuk Hasil Maksimal

Keberhasilan forum ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Program SKALA, yang fokus pada peningkatan pelayanan dasar dan Bappeda Litbang Provinsi Kaltara

> *Pendekatan partisipatif seperti kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada masyarakat miskin, tetapi juga pada kelompok rentan yang seringkali terabaikan.*

memainkan peran kunci dalam memfasilitasi kegiatan ini. Jaringan masyarakat sipil (JMS) seperti Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kalimantan Utara, Forum Generasi Berencana (Genre), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang berada dibawah naungan Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Benuanta Kalimantan Utara (Kaltara) turut aktif berkontribusi dalam menyusun agenda dan Usulan dari setiap kelompok JMS.

"Forum ini bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi tentang bagaimana kita bersama-sama menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan," kata seorang perwakilan SKALA. Ia menambahkan bahwa pendekatan partisipatif seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berpihak pada masyarakat miskin, tetapi juga pada kelompok rentan yang seringkali terabaikan.

Tantangan dan Langkah ke Depan

Meskipun antusiasme peserta tinggi, bukan berarti forum ini berjalan tanpa hambatan. Tantangan seperti keterbatasan anggaran di tengah isu efisiensi dan koordinasi antarsektor masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Namun, semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh semua pihak memberikan harapan besar untuk kemajuan yang lebih baik di masa depan.

Forum MENTARI KALTARA diharapkan tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi dapat menjadi model berkelanjutan untuk pembangunan inklusif di Kalimantan Utara. Pelembagaan forum melalui Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah diserahkan secara simbolis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi langkah awal yang baik untuk memastikan mekanisme penjaringan aspirasi ini terus berjalan.

Membangun Bersama untuk Masa Depan yang Lebih Baik

MENTARI KALTARA telah membuktikan bahwa pembangunan inklusif bukanlah sekadar wacana, tetapi sebuah tindakan nyata. Aspirasi yang terkumpul dalam forum ini akan menjadi panduan berharga bagi para pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan semangat "No One Left Behind," Kalimantan Utara sedang menuju pembangunan yang benar-benar mencakup semua lapisan masyarakat.(RO)









RAKORTEKRENBANG 2025 : PENYELARASAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUNAN

Tanjung Selor - Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Provinsi Kalimanta Utara kembali digelar. Kegiatan berlangsung pada hari Senin - Jum'at, 17 – 21 Maret 2025 dan dilaksanakan secara daring via aplikasi *zoom meeting.*

Kegiatan ini merupakan sebagai bagian tahapan Musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen RKPD Tahun 2026 untuk menyingkronisasi dan menyelarasan kebijakan pembangunan tahunan nasional dan daerah melalui pembahasan capaian sasaran dan hasil program pembangunan daerah provinsi serta rencana target sasaran dan hasil program pembangunan tahunan daerah Kabupaten/ Kota.

Kesepakatan pembahasan Rakorekrenbang Tahun 2025 ini meliputi dukungan sub kegiatan dalam pencapaian outcome prioritas pada masing-masing urusan, dukungan pusat dan daerah terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah dan target indikator makro daerah. Kesepakatan pada pembahasan Rakortekrenbang Tahun 2025 akan dibahas dan dipertajam kembali dalam Musrenbang Provinsi maupun Nasional sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Aspek strategis Rakortek bagi pemerintah daerah adalah menjadi forum untuk menyuarakan kebutuhan daerah dalam mendukung pencapaian target nasional. Daerah paham dalam menindaklanjuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dan kebijakan lain yg disusun Kementerian/Lembaga.

Kesepakatan Rakortek yang berisi sinkronisasi program dan kegiatan pusat - daerah menjadi bahan masukan dalam penyusunan RKPD tahun 2026 dan Renja perangkat daerah, yang dikawal melalui Musrenbang, mekanisme fasilitasi ranperkada tentang RKPD dan evaluasi APBD.

Pemprov. Kaltara terus berkomitmen untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional melalui program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan daerah, serta selaras dengan kegiatan pusat. (AS)



Forum Konsult
Publik RKPD 20

KOMITMEN PEMPROV. KALTARA DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG PARTISIPATIF, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Tanjung Selor - Bertempat di Gedung Gabungan Dinas pada hari Selasa (25/2) digelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut dibuka Gubernur Kalimantan Utara diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E.,M.Si.

"Konsultasi publik adalah salah satu tahapan dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan wadah untuk menjaring informasi dari para pihak," tutur Bustan diawal sambutannya.

Pelaksanaan Konsultasi publik merupakan amanat Pasal 80 dan Pasal 179 Permendagri 86 tahun 2017, yang mana diharapkan melalui kegiatan forum konsultasi publik dapat menjaring aspirasi, data, informasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyempurnaan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026.

Bustan menyebutkan bahwa Pemerintah Provin-



tasi
026

si Kalimantan Utara dalam menyusun RKPD tahun 2026 berpedoman kepada visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 yang disung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang, dan dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional," jelas Bustan.

Sementara itu, dalam paparannya Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan penurunan 1,63 %/th mencapai 6,32 % pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 5,86%/th mencapai 3,90% pada 2024, tergolong lebih rendah dari rata-rata Provinsi di Indonesia. Indeks Gini Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2024 menunjukan pada angka 0,264, lebih rendah dibandingkan dengan 18 provinsi lainnya di Indonesia.

"Ini menunjukkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berhasil menjaga pemerataan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara," terang Bertius. Beliau juga menyampaikan bahwa dalam penyusunan RKPD 2026 ini terdapat 5 (lima) isu strategis daerah diantaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penyediaan energi baru terbarukan.

Hadir dalam kegiatan ini di antaranya akademisi, tokoh masyarakat, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan organisasi kemasyarakatan. (AS)

FORUM PERANGKAT DAERAH RKPD 2026 SUKSES DIGELAR

Tanjung Selor - Mewakili Gubernur Kalimantan Utara, Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi Kalimantan Utara Dr. Bustan S.E, M.Si, membuka dan memberikan arahan dalam kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, Senin (24/3).





RKPD Tahun 2026 ini akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara periode tahun 2025-2029, sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat penting untuk merumuskan dan memastikan rencana kerja masing-masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah.

Bustan saat membuka acara mengingatkan pentingnya rencana kerja yang saling terintegrasi, hal ini agar selaras antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Hal ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan visi tersebut, pemerintah menetapkan 8 misi prioritas yang disebut asta cita, yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan pembangunan nasional. Selain itu pemerintah pusat juga menetapkan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) / *Quick Wins* yang salah satunya adalah penyediaan makanan bergizi gratis bagi siswa, santri ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita.

Sesi dilanjutkan dengan pemaparan oleh delapan perangkat daerah diantaranya Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Satuan Polisi Pamomg Praja yang akan memaparkan rencana kerja perangkat daerahnya tahun 2026 dan akan ditanggapi oleh perangkat daerah lainnya sembari memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025-2029. (AS)

DUKUNG SWASEMBADA PANGAN KALTARA LAKUKAN LANGKAH PERCEPATAN

Tanjung Selor - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Bappeda dan Litbang mengadakan Rapat Tindak Lanjut Inpres No 2 Tahun 2025 yang dihadiri oleh Dinas PUPR-Perkim, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Badan Perbatasan, Biro Pembangunan, Badan Keuangan dan Aset Daerah serta beberapa perangkat daerah terkait pada hari Selasa (11/2).



Seperti diketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Terbitnya inpres ini dalam rangka percepatan pencapaian swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergitas kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa.

Instruksi Presiden ini dikhususkan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota dalam mendukung swasembada pangan.

Bertius, S.Hut selaku Kepala Bappeda dan Litbang yang memimpin rapat tersebut menyampaikan Kaltara tercantum dalam 14 Provinsi yang ada dalam Inpres tersebut maka perlu mengambil langkah-langkah percepatan.

Diketahui bahwa 14 (empat belas) provinsi tersebut terdiri atas Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa Provinsi Kalimantan Utara harus mengambil langkah-langkah percepatan yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan.

Langkah percepatan tersebut diantaranya meliputi percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan mencakup saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya, termasuk antara lain pintu air, tanggul, dan parit, sumur, embung, instalasi pompa/pipanisasi, jaringan distribusi, dan drainase;

Hasil diskusi yang telah dilaksanakan, akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk melakukan validasi data sektoral dari Perangkat Daerah, merumuskan matriks tindak lanjut, serta memastikan aset sudah tercatat di BKAD.(NF)





SOSIALISASI RIPJ-PID 2025-2029 : UPAYA KALIMANTAN UTARA MENJADI PUSAT PENGEMBANGAN IPTEK YANG BERKELANJUTAN

> Riset dan inovasi memainkan peran krusial dalam pembangunan daerah. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya dan kolaborasi multisektor.



Tanjung Selor - Riset dan inovasi memainkan peran krusial dalam pembangunan daerah dengan menciptakan keunggulan kompetitif, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui optimalisasi sumber daya dan kolaborasi multisektor. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Bertius, S.Hut saat membuka kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 – 2029, Rabu (5/3).

Hadir dalam kegiatan ini Bappeda dan Litbang se-Kalimantan Utara serta menghadirkan narasumber Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Dr. Mardiyanto Wahyu Tryatmoko dan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Dr. Adi Suhendra M.Sosio.

Dalam paparannya, Mardiyanto menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan berbasis riset yang diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2019 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk





> *UU No. 11 Tahun 2019 menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk menciptakan solusi inovatif yang berdaya guna bagi pembangunan daerah*

menciptakan solusi inovatif yang berdaya guna bagi pembangunan daerah.

Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa transformasi kelembagaan riset dan inovasi di daerah, sejalan dengan UU Sisnas Iptek dan Perpres 78 Tahun 2021, membutuhkan integrasi perencanaan, pendanaan, serta tata kelola yang efektif guna mendukung pengembangan riset di tingkat daerah.

”Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 mengamanatkan penyusunan RIPJP-ID yang berbasis potensi dan tantangan daerah, memastikan sinergi dengan dokumen RPJMD serta koordinasi yang kuat antara pemangku kepentingan guna meningkatkan daya saing daerah,” sambung Mardiyanto.

RIPJPID 2025-2029 yang terintegrasi dengan RPJMD diharapkan mampu membawa Kalimantan Utara menjadi pusat pengembangan IPTEK yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing global, dengan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Rapat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengarahkan pembangunan Iptek di Kalimantan Utara untuk periode tahun 2025-2029. (AS)





KALTARA JALIN KERJA SAMA DENGAN IPB MELALUI PROGRAM BEASISWA UMUM DAERAH

Tanjung Selor (26/2) – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjalin kerja sama strategis dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui program Beasiswa Umum Daerah (BUD). Inisiatif ini bertujuan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, khususnya di sektor pertanian dan industri berbasis sumber daya alam.

Mengatasi Tantangan Pendidikan di Kaltara

Dalam sambutannya, Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov. Kalimantan Utara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos, M.Si, mengakui bahwa provinsi ini masih menghadapi tantangan besar di sektor pendidikan. "Angka partisipasi sekolah di jenjang perguruan tinggi masih rendah, yakni

"Kami ingin menciptakan *link and match* antara lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan kebutuhan industri di Provinsi Kalimantan Utara"

DATU IQRO RAMADHAN, S.SOS,M.SI
ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROV. KALIMANTAN UTARA



27,98%, jauh di bawah rata-rata nasional. Selain itu, akses pendidikan di wilayah perbatasan dan pedalaman masih terbatas," ujarnya.

Data BPS Kaltara menunjukkan, meski angka partisipasi kasar (APK) untuk SD/MI mencapai 101,52% pada 2023, angka tersebut turun drastis di jenjang SMA/SMK/MA (97,78%) dan perguruan tinggi (27,98%). "Kami berkomitmen untuk mengubah ini melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan berkualitas seperti IPB," tambahnya.

Program BUD : Solusi Konkret untuk Generasi Muda Kaltara

Program BUD IPB dirancang khusus untuk menjaring siswa berprestasi dari Kaltara. Pada 2024, dari lima calon mahasiswa asal Kaltara yang mendaftar ke IPB, hanya satu yang lulus namun tidak melanjutkan pendaftaran ulang. "Ini menjadi alarm bagi kami. Dengan program BUD, kami ingin lebih banyak putra-putri Kaltara yang bisa menimba ilmu di kampus terbaik," jelas perwakilan IPB.

Manfaat program ini meliputi : **Pertama,** Bagi Pemprov Kaltara: Meningkatkan APK perguruan tinggi dan menciptakan SDM unggul yang siap bersaing di industri lokal, khususnya Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI).

Kedua, Bagi IPB: Meningkatkan kuota mahasiswa dari Kaltara sekaligus memperkenalkan program studi yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti agroteknologi dan kehutanan.

Dukungan Multi-Pihak dan Harapan ke Depan

Kegiatan audiensi dihadiri oleh perwakilan OPD provinsi, kepala sekolah SMA/SMK/MA, serta siswa kelas XII. "Kami mendorong siswa untuk memanfaatkan peluang ini. Pendidikan adalah kunci untuk membangun masa depan Kaltara yang lebih baik," ujar seorang kepala sekolah yang hadir.

Pemerintah daerah juga membuka peluang bagi pihak swasta untuk terlibat dalam pendanaan program ini melalui skema CSR atau filantropi. "Kami ingin menciptakan *link and match* antara lulusan IPB dengan kebutuhan industri di Kaltara," tambah Datu Iqro Ramadhan.

Langkah Awal Menuju Transformasi Pendidikan

Kerja sama ini bukan hanya tentang beasiswa, tetapi juga upaya sistematis untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat pantun yang disampaikan Datu Iqro Ramadhan — "Jika pendidikan kita gemilang, masa depan pun cerah dan damai"—Kaltara bertekad menjadikan program BUD sebagai batu loncatan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. (RO)







FINALISASI PENGISIAN DATA PENGUKURAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL

Tanjung Selor - Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Bertius S.Hut memimpin langsung finalisasi pengisian data pengukuran Indeks Ketahanan Nasional pada Selasa (18/2).



Hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara Mas'ud Rifai, SST., MM serta perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Utara. Dalam arahannya, Bertius menyebutkan bahwa proses pengukuran indeks tersebut dengan menggunakan dua pendekatan, yakni jenis pendekatan kualitatif yang asalnya dari data kebijakan dan data kuantitatif dari data kinerja. "Kolaborasi antara BPS sebagai pembina data dan perangkat daerah sebagai produsen data diharapkan dapat menghasilkan keterisian data yang sempurna," terang Bertius.

Beliau juga menegaskan bahwa Indeks Ketahanan Nasional pun akan semakin baik jika didukung dengan kolaborasi antarpihak. Selain itu, Indeks Ketahanan Nasional yang tangguh sangat berpengaruh guna mewujudkan visi Indonesia Maju.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengukuran Indeks Ketahanan Nasional ini mencakup delapan aspek penting yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Data kebijakan dan data kuantitatif dari data kinerja tersebut lalu disatukan, kemudian menghasilkan indeks komposit yang dapat menunjukkan ketahanan nasional Indonesia. Indeks komposit di sini berasal dari kisaran angka satu hingga lima. Adapun indeks 1 menunjukkan ketahanan nasional yang rawan, indeks 2 menunjukkan kurang tangguh, indeks 3 cukup tangguh, indeks 4 menunjukkan tangguh, dan indeks 5 itu sendiri menunjukkan sangat tangguh.

Diketahui bahwa Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI merilis Indeks Ketahanan Nasional sepanjang tahun 2024 mencapai skor 2,87. Angka ini dinilai berada dalam kategori cukup tangguh berdasarkan hasil Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).

Hasil pengukuran indeks nasional ketahanan ini, diharapkan dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian program pembangunan nasional yang sedang berjalan dan dapat dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang. (AS)

PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAERAH MELALUI KOLABORASI RISET



Tanjung Selor - Pentingnya BRIDA/Bapperida/ Bappeda dan Litbang menghasilkan rekomendasi kebijakan terhadap isu, permasalahan pembangunan dan potensi daerah yang berbasis data ilmiah atau berbasis bukti mutlak diperlukan sebagai bahan masukan pada pihak-pihak yang terlibat di dalam proses kebijakan, baik dalam pembuatan kebijakan baru, memperbaharui/memutakhirkan kebijakan yang sudah ada, ataupun melihat dampak *(impact)* suatu kebijakan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wiwiek Joelijani, Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pada Diskusi Usulan Topik Kajian Berdasarkan Isu dan Permasalahan Daerah di Kalimantan Utara yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada Rabu (12/02).

Turut Hadir dalam kegiatan ini Bappeda dan Litbang se- Kalimantan Utara, Periset dan Koordinator Regional BRIN wilayah Kalimantan Utara. Kolaborasi BRIN dan pemerintah daerah dalam kajian berbasis bukti bisa terdiri dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penguatan prioritas unggulan daerah, dan implementasi kebijakan.

BRIN membuka peluang kerja sama, untuk menyelesaikan permasalahan daerah melalui kolaborasi riset dan inovasi. Jika ada keterbatasan sumber daya di daerah, Pemerintah Daerah melalui BRIDA dapat berkolaborasi dengan BRIN, melalui 12 Organisasi Riset dan 85 Pusat Riset.

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara, Mochamad Sarkawi dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa saat ini Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) 2025 - 2029 Provinsi Kalimantan Utara telah rampung disusun. RIPJPID merupakan amanat Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan kepada BRIDA/Bapperida/ Bappedalitbang untuk melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID).

”RIPJPID merupakan acuan bagi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah dan sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah yang selaras dengan Visi dan Misi serta Program Kepala Daerah, dan RPJMD,” tutur Sarkawi.

Sarkawi dalam kesempatan tersebut juga mengapresiasi kegiatan ini dan berharap melalui rapat ini, terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan BRIN dalam membangun kebijakan berbasis bukti yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing daerah.(AS)

SEKILAS INFO

« 8 JANUARI 2025

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Mochamad Sarkawi menerima kunjungan Bappeda dan Litbang Kabupaten Bulungan yang dipimpin Reni Mayasari, ST, MAP selaku Kepala Bidang Litbang Kabupaten Bulungan untuk melakukan sharing session. Topik bahasan pada sharing session ini adalah pelaksanaan kajian/penelitian dan publikasi hasil kelitbangan.

« 13 JANUARI 2025

2. Pelaksanaan Evaluasi Renja Triwulan ke IV Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Gabungan Dinas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat capaian, identifikasi permasalahan, dan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja di masa depan.

« 10 MARET 2025

3. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut menyerahkan Kamus Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, SE, MM pada kegiatan Sosialisasi Kamus Pokir DPRD untuk penyusunan RKPD Tahun 2026. Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Sekretariat Dewan, serta seluruh Kepala Bidang beserta Staf Bappeda dan Litbang. Pada kegiatan sosialisasi ini, Kepala Bappeda dan Litbang menyampaikan Alur Pengusulan hingga Verifikasi Pokok-Pokok Pikiran DPRD pada aplikasi SIPD RI.

« 10 MARET 2025

4. Bappeda dan Litbang bersama dengan BPS dan DKISP melaksanakan verifikasi capaian data statistik sektoral ke perangkat daerah di lingkungan Pemprov. Kalimantan Utara. Proses ini penting dilaksanakan untuk memastikan keakuratan, kualitas, dan ketergunaan data statistik yang dihasilkan oleh perangkat daerah.

« 27 MARET 2025

5. Kepala Bappeda dan Litbang, Bertius S.Hut menjadi narasumber pada Musrenbang RKPD Kabupaten Malinau Tahun 2026 di ruang Laga Feratu kantor Bupati Malinau. RKPD memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan terkait erat dengan dokumen perencanaan jangka panjang (RPJPD) serta rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD). Adapun tema pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2026 adalah “Pemantapan keunggulan SDM, perekonomian, infrastruktur, dan profesionalitas pemerintah dalam kemantapan, kemandirian, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat.”




1


2
Evaluasi Renja Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara
Triwulan IV Tahun 2024


3


4


5
KABUPATEN MALINAU
MUSRENBANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2026

LANGKAH BERSAMA MENUJU PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT LESTARI

[GIZ]

Pelestarian lingkungan hidup menjadi salah satu program prioritas pemerintah saat ini. Pemanfaatan sumber daya alam diharapkan mampu mendukung perekonomian lokal terlebih dengan upaya pengembangan hilirisasi/industrialisasi berbasis sumber daya alam.

Kebijakan yang mendasari program tersebut harus sejalan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat dalam jangka panjang. Terlebih pada ekosistem yang rentan terhadap perubahan seperti ekosistem gambut.

Integrasi dalam pengelolaan ekosistem gambut merujuk pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional Nomor SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017.

Dalam Keputusan tersebut, terdapat 865 Kesatuan Hidrologis Gambut di Indonesia dan Pulau Kalimantan memiliki KHG terluas yaitu 9.604.529 ha.

Ekosistem gambut memiliki peran penting dalam tata air, penyimpan karbon untuk stabilitas iklim, keragaman hayati serta penyokong kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan holistik dan terintegrasi menjadi kunci dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Pemerintah mengusung pendekatan berbasis lanskap yaitu Kesatuan Hidrologis Gambut yang memiliki definisi ekosistem gambut yang letaknya diantara 2 Sungai, di antara Sungai dan laut, dan/atau pada rawa.



Foto: Kanal dan pemukiman Desa Tagul Kabupaten Nunukan



Foto: Proses penyusunan tata ruang Desa Atap Kabupaten Nunukan



Foto: Kegiatan pertanian masyarakat di lahan gambut Desa Atap

Pengelolaan dalam satu KHG akan saling mempengaruhi antara satu area dengan area lainnya. KHG sebagai batas ekologis dapat berada dalam satu wilayah administrasi tetapi seringkali melintasi beberapa wilayah. Sinkronisasi dan koordinasi para pihak dan pengambil kebijakan mutlak dilakukan.

Semakin gencarnya Pembangunan di berbagai wilayah pedesaan harus diimbangi dengan pemahaman tentang potensi sumber daya alam di tingkat desa. Prinsip Pembangunan ramah gambut wajib dilakukan untuk meminimasi dampak jangka panjang akibat kerusakan gambut.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten, GIZ mendukung penyusunan RPPEG (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut) yang telah disahkan pada tahun 2024.

Implementasi RPPEG dilaksanakan hingga level desa sehingga proyek akan mendukung 2 (dua) KHG model di Kalimantan Utara serta pendekatan Pembangunan pedesaan berbasis KHG.

Strategi ini dipilih agar terjadi kolaborasi antar desa dalam KHG yang sama sehingga potensi sumber pangan dan sumber daya air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Konteks Pembangunan berbasis KHG ini meliputi pengembangan kapasitas lembaga pelaksana, pendampingan dalam pengembangan RPJMDes berbasis ekosistem, identifikasi program/kegiatan Desa ramah gambut serta monitoring.

Langkah besar ini membutuhkan dukungan berbagai pihak serta visi yang sama terkait kelestarian ekosistem gambut di Kalimantan Utara. Pembangunan pedesaan berbasis KHG merupakan strategi Bersama dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Komitmen yang kuat serta kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, universitas serta mitra pembangunan diharapkan dapat menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan ekosistem gambut. (GIZ)





MENYONGSONG KALTARA EMAS ATAU KALTARA CEMAS ?

[**Penulis :** Nuraini Asri[1]]

Dalam periode 2021 hingga 2024, terdapat 746 kasus pada anak yang terlaporkan di Provinsi Kalimantan Utara. Sebagian besar adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ibarat gunung es, boleh jadi kasus kekerasan yang terjadi jauh lebih besar daripada yang dilaporkan, karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Dari 746 kasus kekerasan yang dilaporkan, 250 kasus adalah kekerasan fisik, 197 kasus adalah kekerasan psikis, 455 kasus adalah kekerasan seksual, 18 kasus adalah eksploitasi, 8 kasus adalah trafficking, 40 kasus adalah penelantaran dan 39 kasus lainnya.

Orang terdekat menjadi pelaku utama pelaku kekerasan terhadap anak di Kaltara, 55 kasus pelakunya adalah orang tua, 22 kasus pelakunya adalah keluarga/saudara, 2 kasus pelakunya adalah suami/istri korban, 36 kasus pelakunya adalah tetangga, 81 kasus pelakunya adalah pacar/teman, 11 kasus pelakunya adalah guru, 1 kasus pelakunya majikan, dan 35 kasus oleh pelaku lainnya. Kasus yang menimpa IM di Tarakan tahun lalu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kasus perundungan *(bullying)* yang terjadi di sekolah.

Perundungan adalah tindakan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja oleh satu atau beberapa orang terhadap orang lain yang lebih lemah. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti verbal, fisik, sosial dan kekerasan di dunia maya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI bahwa angka persentase balita yang mengalami pengasuhan tidak layak di Kalimantan Utara terbilang tinggi, yaitu sebesar 6,77 persen jika dibandingkan dengan data nasional 2,98% di tahun 2022 (BPS, 2022).

Dari data-data diatas terlihat bahwa pelaku kekerasan pada anak lebih banyak dilakukan oleh pacar/teman dan orang tua. Hal ini menjadi pertanda bahwa anak yang mengalami kekerasan di rumah baik secara fisik dan psikis maka kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan pada anak yang lain.

Albert Bandura dalam *Social Learning Theory* (1977) menuliskan bahwa"Sebagian besar pembelajaran manusia diperoleh melalui observasi secara selektif dan peniruan terhadap perilaku orang lain.



Dengan mengamati suatu model, individu membentuk gagasan tentang bagaimana pola perilaku tertentu dilakukan, kemudian informasi tersebut dijadikan pedoman dalam bertindak di kemudian hari".

Dalam konteks pengasuhan, ini berarti bahwa anak tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan secara langsung, tetapi juga dari bagaimana orang tua dan lingkungan sekitarnya berperilaku. Misal jika orang tua bersikap sabar dan penuh empati, anak cenderung meniru sifat tersebut.

Sebaliknya jika anak sering melihat orang tua marah atau berkata kasar atau mungkin sering dipukuli, maka ia juga bisa mengadopsi pola perilaku yang sama. Prinsip utama dari teori ini adalah modeling (peniruan perilaku), yang menjadikan orang tua sebagai role model utama bagi anak dalam membentuk kebiasaan, nilai, dan sikap.

Dr. Ibrahim Elfiky dalam Terapi Berpikir Positif mengatakan bahwa seseorang terbiasa meniru orang lain untuk membentuk kepribadiannya, dan orang pertama yang kita tiru serta menjadi tempat belajar adalah orang tua.

Mengapa anak berperilaku buruk atau menjadi pelaku perundungan? Ada kombinasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku mereka.

Pertama, **Faktor Keluarga.** Praktik pola asuh yang salah masih banyak terjadi, khususnya di lingkungan keluarga yang berada di wilayah pedesaan Kalimantan Utara.

Pola asuh yang salah mencakup: (i) cara mendidik yang terlalu otoriter atau terlalu permisif yang dapat membuat anak berperilaku agresif; (ii) kurangnya perhatian atau kasih sayang dari orang tua yang dapat membuat anak mencari perhatian dengan berperilaku negatif; (iii) membiarkan anak terbiasa dengan praktik kekerasan yang dapat membuat mereka meniru perilaku tersebut di luar rumah.

Tabel disamping menunjukkan sebagian dari praktik itu, khususnya: (i) memanggil mereka dengan panggilan yang buruk dan merendahkan; (ii) membentak dan menakutinya; (iii) mencubit/menjewer; dan (iv) melakukan kekerasan fisik pada anak, masih lazim terjadi di Kaltara, khususnya di wilayah pedesaan.

Orang tua selalu mempunyai pengaruh yang paling kuat pada anak. Setiap orang tua mempunyai pola asuh tersendiri dari segi asuh, asah, dan asih dalam hubungannya dengan anak-anaknya, dan ini mempengaruhi perkembangan anak (Djiwandono, 2003).

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama dan utama bagi anak sehingga memberi pengaruh terbesar bagi perkembangan anak. Keluarga terutama ayah dan ibu memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pola dan tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat (Soetjiningsih, 2002).

Pola asuh orang tua yang baik dengan selalu

Pengasuhan Anak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No	Pengasuhan Anak	Perkotaan	Pedesaaan	Perkotaan + Pedesaan
1	Menjelaskan pada anak bahwa perilakunya salah	95,10%	87,46%	92,08%
2	Menghukum anak dengan mengurangi atau melarang melakukan sesuatu yang disukai anak	45,87%	41,07%	43,97%
3	Memberikan tugas/pekerjaan pada anak yang melakukan kesalahan	40,52%	18,36%	31,77%
4	Memanggilnya bodoh, pemalas, tidak berguna, mengatakan tidak sayang lagi atau sebutan lain yang sejenis	10.18%	20,17%	14,13%
5	Membentak atau menakutinya	42,44%	45,84%	43,78%
6	Mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu	0,70%	1,72%	1,11%
7	Mendorong atau mengguncang badannya	-	1,74%	0,69%
8	Mencubit/menjewer	26,23%	45,08%	33,67%
9	Menampar, memukul, menjambak atau menendang	1,88%	11,37%	5,63%

Sumber : Statistik Ketahanan Nasional Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020



mengekspresikan kasih sayang (memeluk, mencium, memberi pujian), melatih emosi dan melakukan pengontrolan pada anak akan berakibat anak merasa diperhatikan dan akan lebih percaya diri, sehingga hal ini akan membentuk pribadi anak yang baik.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak sejak dini yang meliputi perkembangan personal sosial, bahasa, motorik halus dan motorik kasar. Anak yang merasa diperhatikan dan disayangi oleh orang tuanya tidak ada rasa takut untuk bergaul dengan orang lain, anak lebih berekspresif, kreatif, tidak takut untuk mencoba hal-hal baru sehingga perkembangan anak terutama anak-anak di bawah 5 tahun akan maksimal.

Hal ini sesuai dengan penelitian Borowitz, 1986 (dalam buku Soetjiningsih, 2002) menyebutkan alat DDST *(Denver Developmental Screening Test)* dapat mengidentifikasi 85 – 100 % bayi dan anak-anak prasekolah yang mengalami keterlambatan perkembangan, dan pada follow up selanjutnya ternyata 89 % dari kelompok DDST abnormal mengalami kegagalan di sekolah 5-6 tahun kemudian (Fatimah, 2024)

Kedua, **Faktor Pribadi.** Jumlah anak yang menjadi korban salah didik di Kalimantan Utara cukup signifikan. Tarakan, Nunukan, dan Bulungan adalah kabupaten dan kota dengan jumlah anak korban salah pola asuh terbesar di Kalimantan Utara (Tabel 4).

Anak-anak salah pola asuh ini menghadapi masalah ketidakmampuan mengelola emosi (mudah marah, frustasi, atau melampiaskan emosi dengan menyerang orang lain, hingga melakukan pelanggaran hukum). Anak-anak ini adalah korban perlakuan buruk ketika mereka berada di rumah, sehingga mereka akan membagi rasa tidak nyaman yang mereka rasakan kepada teman-temannya dan orang-orang yang ada disekitarnya.

Dampak Pengasuhan Tidak Layak Pada Anak Provinsi Kaltara Tahun 2023

No	Kasus Anak	Kab/Kota				
		Bulungan	Malinau	Nunukan	Tana Tidung	Tarakan
1	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	10	5	46	3	17
2	Anak pemakai narkoba/zat adiktif	0	0	0	0	1
3	Anak mengalami kesulitan/gangguan mengendalikan perilaku	664	534	961	97	833
4	Anak mengalami kesulitan/gangguan mengingat/berkonsentrasi	1.098	686	1.261	192	1.296
5	Anak mengalami kesulitan/gangguan berbicara/berkomunikasi	766	422	872	99	849
6	Anak mengalami gangguan kesedihan depresi	4.007	2.816	4.017	240	7.985

Sumber : Regsosek Tahun 2022

Kesehatan emosi dan mental remaja berkaitan dengan jenis pendidikan yang diterimanya, misalnya otoriter, toleran, atau demokratis. Penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan orang tua otoriter 3.258 kali lebih besar kemungkinannya untuk melakukan perilaku seksual berisiko dibandingkan remaja dengan gaya pengasuhan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh otoriter berdampak negatif terhadap perilaku remaja.

Dan hal ini pula dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan mental anak, mempengaruhi cara mereka berpikir, bertindak dan mengambil keputusan, terutama jika menyangkut perilaku negatif. Sebagai wali, orang tua berperan dalam mengasuh, memaknai, mendidik, dan memberikan pengalaman positif bagi perkembangan keterampilan anak (Latifah, dkk, 2023).

Ketiga, **Pengaruh Lingkungan Sekolah.** Belum semua sekolah di Kalimantan Utara menjadi tempat ramah anak dan bebas perundungan *(bullying).* Salah satu cara untuk mencegah kekerasan di sekolah adalah dengan menerapkan program Sekolah Ramah Anak (SRA). Namun, jumlah sekolah yang sudah menerapkan program SRA di Kalimantan Utara masih rendah (54 persen). Kabupaten Tana Tidung, Nunukan, dan Malinau adalah kabupaten dengan jumlah sekolah paling sedikit dalam penerapan program SRA.

Jumlah Sekolah Ramah Anak di Kalimantan Utara Tahun 2024

Tabel 5. Jumlah Sekolah Ramah Anak di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah	Sekolah Ramah Anak (SRA)	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA)
1	Bulungan	437	384	87,9%
2	Malinau	214	72	33,6%
3	Nunukan	435	98	22,5%
4	Tana Tidung	58	11	19,0%
5	Tarakan	264	205	77,7%
	Kaltara	1.408	770	54,7%

Sumber : DP3AP2KB Prov. Kaltara

Menjawab Tantangan dengan Strategi Terarah

Berikut adalah beberapa rekomendasi konkret yang diusulkan untuk menjawab tantangan tersebut diatas.

Penguatan Peran Keluarga. Adakan pelatihan parenting untuk mendukung orang tua dalam mengasuh anak, termasuk keterampilan komunikasi dan penanganan konflik serta mengharuskan para ayah untuk mengikuti kelas parenting karena selama ini yang mengikuti kelas parenting hanya para ibu, padahal ayah adalah pemimpin dalam keluarga yang akan menentukan kemana keluarganya akan dibawa apakah menuju surga atau sebaliknya. Selain itu sediakan layanan konseling keluarga untuk mengatasi masalah internal yang memengaruhi anak. Hal ini bisa dilakukan oleh sekolah, Diknas, DP3AP2KB, Diskominfo, Kemenag, Dinas Sosial, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/adat, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.



Intervensi di Sekolah. Dengan Program Sekolah Ramah Anak yang bertujuan agar anak-anak merasa bahagia ketika berada di sekolah, yang menerapkan kebijakan anti perundungan, pendidikan karakter, dan lingkungan inklusif. Selain itu ada Psikolog Sekolah untuk mendukung anak dengan masalah emosional atau perilaku.

Kembangkan mekanisme untuk mendeteksi masalah perilaku anak sejak dini serta adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh sekolah, Diknas, DP3AP2KB, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/adat, forum anak, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.

Intervensi Sosial. Dirikan pusat rehabilitasi untuk anak yang menghadapi masalah serius seperti kekerasan, penyalahgunaan zat, atau kriminalitas serta menawarkan bimbingan, pembelajaran, dan aktivitas yang positif, libatkan figur panutan dari komunitas untuk membimbing anak bermasalah. Sediakan layanan psikologis yang terjangkau dan mudah diakses untuk anak-anak dan adakan kampanye kesehatan mental yang mempromosikan kesadaran akan masalah mental pada anak. Hal ini bisa dilakukan BNN, Kepolisian, Dinsos, Diknas, DP3AP2KB, Himpsi, lembaga masyarakat, lembaga agama/adat, forum anak, dunia usaha, media massa, dan lain-lain.

Kebijakan Daerah/Nasional. Perkuat undang-undang/perda yang melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, atau diskriminasi, membuat Perda yang mengatur sinergi dan kolaborasi antar dinas/badan, universitas, lembaga think tank, dan Jaringan komunitas Masyarakat Sipil, dll.

Pendekatan Berbasis Data. Mengadakan survei dan penelitian untuk mengumpulkan data tentang faktor penyebab anak bermasalah untuk merancang intervensi yang lebih efektif. Lakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan yang diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Hal ini bisa dilakukan oleh BPS, Bappeda, universitas, LSM, dll. (NA)

REFERENSI

Elfiky, Ibrahim, Terapi Berpikir Positif,

Amalia, R., & Hamid, A. (2020). Adiksi Smartphone, Kesehatan Mental Anak, dan Peranan Pola Asuh. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, 3(2), 221-240.

[1] Analis Kebijakan Ahli Muda DP3AP2KB Provinsi Kaltara





ANAK TIDAK SEKOLAH DI KALIMANTAN UTARA

[Penulis : Cici Tri Yulita[1]]

Provinsi Kalimantan Utara bukanlah lagi provinsi termuda melainkan salah satu provinsi terluar indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia, tepatnya Sabah dan Sarawak.

Provinsi Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Tarakan.

Ibu Kota Provinsi Kaltara terletak di Tanjung Selor yang juga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bulungan. Sejak ditetapkannya Kalimantan Utara sebagai provinsi Ke 34 pada tahun 2012 sampai dengan saat ini, Program Pembangunan di Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan salah satunya adalah Tingkat Kemiskinan yang tiap tahunnya mengalami penurunan.



Jumlah Penduduk miskin di Kalimantan Utara pada Maret 2024 sebanyak 47,83 ribu (6,32 persen). Pada Maret 2023 penduduk miskin berjumlah 47,97 ribu (6,45 persen), berarti jumlah penduduk miskin berkurang 0,14 ribu jiwa atau secara presentase menurun 0,13 persen poin.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara dalam enam tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik, namun jika dilihat dari sektor pendidikan kualitas dan kuantitas pendidikan di Kalimantan Utara masih perlu dilakukan peningkatan.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		
	2021	2022	2023
SD/MI	93,38	93,69	94,73
SMP/MTs	79,21	79,38	80,53
SMA/SMK/MA	65,37	65,85	66,70

Sumber : BPS 2024 Kaltara

APM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada setiap jenjang pendidikan baik SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SM/Sederajat. APM tertinggi pada Tingkat SD/Sederajat sebesar 94,73. APM pada Tingkat SMP/sederajat sebesar 80,53 persen dan APM pada Tingkat SMA/Sederajat sebesar 66,70 persen.

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)		
	2021	2022	2023
SD/MI	99,78	100,70	101,52
SMP/MTs	100,90	99,85	97,60
SMA/SMK/MA	96,55	97,57	97,78

Sumber : BPS 2024 Kaltara

Angka Partisipasi Kasar menggambarkan partisipasi penduduk yang sedang menempuh pendidikan tanpa mempertimbangkan usia. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu daerah dalam sektor pendidikan.

Pada Tahun 2023, APK untuk Tingkat SD/Sederajat sebesar 101,52, Tingkat SMP/sederajat sebesar 97,60 dan Tingkat SMA /sederajat sebesar 97,78. Angka APK yang lebih tinggi daripada APM menunjukkan adanya penduduk yang tidak sekolah tepat waktu.

Jika dicermati Kembali, APK dan APM menunjukkan adanya kecenderungan penurunan setiap jenjang sekolah yang lebih tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait akses pendidikan menengah dan tinggi yang capaiannya belum setinggi pendidikan dasar.



Berdasarkan data ATS per januari 2025, jumlah ATS di Kalimantan Utara masih cukup tinggi. Anak Tidak Sekolah merupakan sebuah kondisi sosial dimana seseorang tidak pernah memasuki sebuah lembaga pendidikan, pada tingkat SD SMP, dan SMA yang kemudian dikategorikan menjadi anak tidak sekolah yang *drop out,* lulus tidak melanjutkan dan belum pernah bersekolah.

Sedangkan anak terancam putus sekolah merupakan sebuah kondisi dimana anak yang bersekolah, kemungkinan besar mengalami kegagalan dalam menyelesaikan sekolahnya/ tidak bisa melanjutkan sampai tamat dikarenakan beberapa faktor. Kelompok Anak Tidak sekolah dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Anak yang berada di daerah 3T
2. Anak yang bekerja dan pekerja anak
3. Anak penyandang disabilitas
4. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)
5. Anak jalanan (Anjal) dan Anak terlantar (Antar)
6. Anak dalam pernikahan anak/ibu remaja
7. Kelompok ATS lainnya

Pada Tahun 2025 di Kota Tarakan ditemukan 20 anak dari tiga RT yang telah putus sekolah. Anak-anak ini berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Ditengah kemajuan Kota Tarakan serta melihat fenomena ATS ini menjadikan perlunya perhatian secara khusus dan prioritas serta tindak lanjut intensif dari pemerintah dan pihak pemangku kepentingan lainnya.

Selanjutnya, pada Tahun 2022 di Kabupaten Nunukan ditemukan sejumlah 555 anak yang putus sekolah. Setelah ditelusuri faktor penyebabnya adalah ekonomi, kecacatan fisik atau mental (disabilitas pada anak), minat anak dan pola pikir orang tua mengenai pentingnya pendidikan yang mengakibatkan terjadinya pernikahan dini dan meningkatnya pekerja anak khususnya pada budidaya rumput laut dengan jumlah 555 Anak Tidak Sekolah.

Berdasarkan hasil verifikasi data anak tidak sekolah diatas teridentifikasi bahwa anak tidak sekolah disebabkan oleh berbagai macam faktor yang telah dikelompokkan menjadi 13 Faktor penyebab anak tidak sekolah. Dapat dilihat sebanyak 50% anak dengan usia peserta didik di Kalimantan Utara (Provinsi, Kabupaten dan Kota) lebih memilih bekerja daripada bersekolah.



Dua kasus diatas merupakan 1 dari 10 kondisi ATS di Kalimantan Utara yang terpotret serta memerlukan penanganan secara cepat dan tepat. Apabila hal ini terus terabaikan hal ini berakibat dapat mencermikan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Utara.

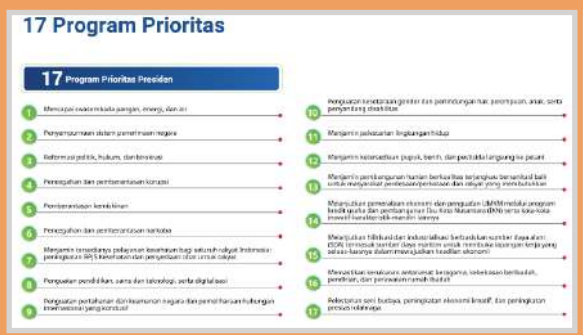
Banyak keluarga di Kalimantan Utara yang masih hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit sehingga anak-anak harus membantu orang tua mereka bekerja, dan orang tua tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah seperti perlengkapan buku, seragam sekolah dan transportasi, juga beberapa faktor lainnya seperti anak yang berkebutuhan khusus tidak ditempatkan pada sekolah khusus, anak-anak yang mengalami kekerasan verbal maupun nonverbal, kekerasan seksual sehingga menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan sekolah.

Berbagai faktor menyebabkan tingginya ATS, mulai dari faktor ekonomi keluarga, faktor sosial, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, budaya, kurangnya minat anak untuk sekolah, hingga kurangnya kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan. Permasalahan ini bersifat multidimensional, sehingga pendekatan penanganannya harus bersifat holistic, integrative, dan berbasis spasial dengan melibatkan berbagai pihak (Kerjasama multipihak) serta pemangku kepentingan lainnya.

Dengan adanya fenomena ATS ini, pemerintah pusat dan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terus melakukan upaya Kerjasama multipihak untuk menurunkan ATS di wilayah Kalimantan Utara. Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat visi misi presiden yang dikemas dalam 8 ASTA CITA dan 17 Program Prioritas Presiden yang mencakup rencana Pembangunan diberbagai sektor secara serta Langkah – Langkah berupa program Hasil Terbaik Cepat/ *Quick Wins.*









Pencegahan dan Penanganan ATS sekolah masuk sebagai intervensi secara konkret dalam pendidikan dan Kesehatan yang merupakan pilar utama dalam mendukung sumber daya manusia yang produktif dan termuat didalam 83 kegiatan priroitas utama Priroitas Nasional 4 : Memperkuat pembangungan sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas sebagai Langkah konkret mencapai sasaran jangka menengah terutama untuk pencapaian sasaran penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

35	Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	Prioritas Nasional 4
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	



Komitmen Pemerintah Pusat dalam melakukan pencegahan dan penanganan ATS telah tertuang secara jelas didalam dokumen RPJMN 2025-2029. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga saat ini sudah melakukan terobosan baru dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan ATS sebagai strategi dalam melakukan penanganan ATS 5 (lima) tahun ke depan. Dengan melakukan pendekatan Kerjasama Multipihak *(Mulltistakeholder Partnership)* untuk mencapai tujuan menurunnya angka anak tidak sekolah sebagai *Goals* didalam 17 Tujuan SDGs.

Dengan harapan apa yang sudah direncanakan dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan dan dampak yang dirasakan juga semakin terlihat. Suatu daerah dapat dikatakan maju apabila daerah tersebut bisa menempatkan pendidikan sebagai priroitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM nya. Saat ini juga daerah tidak bisa berdiri tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, dan semoga kedepannya ini bisa menjadi rujukan dan pedoman bagi para pihak untuk lebih aware terhadap kondisi pendidikan di Kalimantan Utara. (CTY)

[1] Analis Informasi Pengembangan SDM Aparatur, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara



PENYUSUNAN POLICY PAPER SEBAGAI SYARAT HASIL KERJA MINIMAL

[Penulis : Maimunah[1]]

Paska dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara memiliki kelompok jabatan fungsional yaitu Jabatan Fungsional Perencana.

Jabatan Fungsional Perencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pejabat Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melakukan tugas teknis perencanaan pembangunan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Dengan menduduki Jabatan Fungsional, seorang ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2014 mewajibkan setiap ASN untuk memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu kompetensi sosial kultural, kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.

Kompetensi sosial kultural ASN diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, sehingga setiap ASN memiliki wawasan kebangsaan.

Sedangkan kompetensi manajerial ASN diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Adapun Kompetensi teknis ASN diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis.

Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran atau situasi tertentu yang meliputi pengetahuan, keterampilan, keahlian, sifat, peran sosial, citra diri dan motif yang termanifestasikan dalam perilaku.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana, pada Bab VI pasal 17 bahwa PNS yang menduduki Jabatan



[1] Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Fungsional Perencana harus memenuhi Standar Kompetensi.

Kompetensi yang disyaratkan dalam uji kompetensi perencana adalah kompetensi teknis. Apa itu kompetensi teknis ? Mengapa kompetensi teknis yang dipilih sebagai materi dalam Uji Kompetensi? Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berkaitan dengan bidang teknis tertentu.

Kompetensi ini dapat diukur dan dikembangkan. Kompetensi teknis dipilih sebagai materi dalam uji kompetensi karena untuk mengukur kemampuan dan pengetahuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu yang relevan dengan pekerjan atau profesinya, dan setiap individu diharapkan mampu untuk mengembangkan dan mempertahankan kompetensi teknis mereka sesuai dengan tuntutan peran dan tanggung jawabnya. Kompetensi teknis dalam hal ini adalah *hard skill* dan *soft skill.*

Kementerian PPN/Bappenas melalui Pusbindiklatren berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para Perencana. Salah satu layanan tersebut adalah dengan mengadakan Sosialisasi Penyusunan *Policy Paper* sebagai syarat Hasil Kerja Minimal (HKM), yang dilaksanakan di awal Februari lalu.

HKM merupakan dokumen makalah kebijakan yang dipublikasikan oleh Perencana Ahli Muda dan/atau Perencana Ahli Madya untuk menguji kenaikan jenjang ke Ahli Madya dan/atau Ahli Utama. Dalam HKM harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu :

Pertama, **Harus Ada Tulisan Karya Ilmiah**. Tulisan karya ilmiah tersebut dibuat dalam bentuk dokumen kebijakan yaitu *Policy Paper* (makalah kebijakan), *Policy Brief* (ringkasan kebijakan) atau *Policy Memo/note* (memo kebijakan). HKM yang disyaratkan dalam uji kompetensi Jafung Perencana adalah *Policy Paper.* Makalah kebijakan ini harus ditulis oleh 1 (satu) orang.

Kedua, **Harus Dipublikasikan.** Untuk publikasinya pada Jurnal, majalah, buletin, buku ,prosiding, dan media publikasi lainnya dengan syarat memiliki ISSN dan ada reviewer minimal 1 (satu) orang.

Untuk kenaikan jenjang dari Muda ke Madya, makalahnya dipublikasikan pada media lokal, jika kenaikan jenjang dari Madya ke Utama dipublikasikan pada media Nasional/Internasional.

Apa itu *policy paper* dan mengapa Fungsional Perencana harus membuat *policy paper* ? *Policy Paper* adalah dokumen yang berisi analisis data dan rekomendasi terkait isu kebijakan tertentu dan perencana harus membuat *policy paper* karena perencana harus aktif dan piawai dalam membuat kebijakan publik.

Policy paper harus memiliki rumusan kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah / orientasi pada masalah. Rekomendasinya adalah kebijakan yang diusulkan pada pimpinan untuk dirumuskan. Penyusunan *policy paper* bukan hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan investasi penting dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. (MM)





LAYANAN SIPLAKU PENANAMAN MODAL DALAM GENGGAMAN

[**Inovator :** Dewi Martha Silaen]

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, penting untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Utara bertugas menyediakan penyajian data investasi Kaltara.

Oleh sebab itu, sebagai sebuah organisasi pemerintah yang bertugas dalam menyajikan data investasi Kaltara yang aktual, perlu membangun sistem yang berkualitas yang dapat mendukung tugas dan fungsi dari DPMPTSP.

Untuk itulah terobosan inovasi yang di terapkan se- Provinsi Kalimantan Utara adalah layanan kepada pelaku usaha penanaman modal se-Kalimantan Utara melalui sistem *android marketplace,* atau disebut SipLaKUPM (Sistem Informasi Pelaku Usaha Penanaman Modal Kalimantan Utara) yang hadir sebagai solusi sistem yang mempermudah akses informasi internal dan eksternal DPMPTSP Provinsi Kaltara dalam hal kebutuhan data dan layanan informasi investasi secara dinamis dan statis. Semua data tersedia dalam genggaman yang terintegrasi.



Ada proses yang selalu bergerak maju sehingga ada kebermanfaatan digital. SipLaKU Penanaman Modal bertujuan memberikan layanan pelaku usaha penanaman modal berbasis *android marketplace,* yang akan menyasar seluruh pelaku usaha penanaman modal se-Kaltara, serta memenuhi layanan satu data investasi penanaman modal Kalimantan Utara dalam genggaman, baik itu intern dan ekstern Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna.

SipLaKU Penanaman Modal ini menjadi yang pertama dalam menerapkan kemajuan teknologi yaitu berupa [1] sistem untuk mengatur, [2] pengguna data sebagai pendukung sistem. Sistem ini sendiri disebut Sistem Informasi Pelaku Usaha

Penanaman Modal Kalimantan Utara.

Para pengguna data (penyedia data layanan) akan membantu para pengguna data lainnya (pelaku usaha atau masyarakat umum), untuk menginput data-data penanaman modal ke dalam sistem secara online. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat bagi para pengguna data untuk mengakses informasi data yang diperlukan secara mudah dan efisien.

Sehingga, secara global kegiatan usaha UMKM dapat terfasilitasi secara sistematis dan terjamin legalitas, karena UMKM tidak lagi bergerak sendiri-sendiri tetapi secara kolektif dalam waktu singkat. Para pengguna data dapat mengakses informasi usaha sesuai kebutuhan.

Dengan demikian unsur akuntabilitas dan transparansi informasi mengenai progres penanaman modalnya terpenuhi. Melalui inovasi aplikasi SipLaKU Penanaman Modal secara global, kegiatan usaha UMKM dapat terfasilitasi secara sistematis dan terjamin legalitasnya.

Karena penyajian informasi dalam SipLaKU Penanaman Modal sudah tergolong lengkap. UMKM tidak lagi bergerak sendiri-sendiri tetapi secara kolektif dalam waktu singkat.

Kemudahan akses ini memang merupakan hal krusial yang diperlukan oleh para pengguna data UMKM, karena dengan demikian unsur akuntabilitas dan transparansi informasi mengenai progres penanaman modalnya terpenuhi. Kemudahan pemenuhan kebutuhan data investasi tersebut tentu juga dapat meningkatkan kepercayaan para calon investor yang ingin berinvestasi pada UMKM di Kaltara.

Sehingga secara otomatis dapat mendongkrak investasi melalui produk lokal. Selain itu para investor juga dapat mengetahui informasi peluang-peluang investasi lainnya yang ada di Kaltara karena SipLaKU Penanaman Modal menyediakan informasi data dalam tujuh tahun terakhir.

Ekonomi mikro yang dapat terus bertumbuh pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan lapangan kerja dan pada skala makro dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, tentu saja inovasi ini menerapkan kemajuan teknologi berupa sistem untuk mengatur dan pengguna data sebagai pendukung sistem.

Namun upaya tersebut belum maksimal dikarenakan masih ada fitur-fitur dalam sistem yang masih harus diintegrasikan dengan sistem BKPM RI. Untuk itu dilakukan beberapa penyesuaian khususnya data izin para pelaku usaha yang memiliki NIB milik Provinsi Kaltara secara otomatis nantinya akan masuk dalam SipLaKU Penanaman Modal.





BUSAK PAUD: IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI TANA TIDUNG

[**Inovator :** Vamelia Ibrahim]

Bunda PAUD adalah mitra pemerintah daerah dalam menjalankan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung memiliki visi Terwujudnya Tana Tidung Yang Bermartabat, Sejahtera, Indah, dan Humanis (BERSIH) dengan misi pertama yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Misi tersebut dijalankan melalui program KTT Pintar dan KTT Sehat. Diantara tantangan yang dihadapai pada bidang kesehatan dalam meningkatkan sumber daya manusia ialah stunting. Hasil Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Tana Tidung tahun 2022 mencapai 30,7%.

Tentu ini merupakan suatu tantangan besar yang harus segera ditangani. Sedangkan pada bidang pendidikan, rendahnya satuan PAUD terakreditasi B menjadi tantangan. Akreditasi merupakan suatu penilaian kualitas layanan. Akreditasi minimal B merupakan indikator kinerja pemerintah daerah sebagaimana dikemukakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

Namun pada tahun 2022, hanya 58% satuan PAUD yang terakreditasi minimal B. Beranjak dari kondisi tersebut, maka sebagai Bunda PAUD yang menjadi mitra pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk menurunkan stunting dan meningkatkan kualitas satuan PAUD. Hal ini dilakukan melalui inovasi BUSAK PAUD yang merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Tana Tidung. Busak dalam bahasa tidung artinya bunga. Hal ini memberikan harapan anak di Tana Tidung tumbuh dan berkembang. Dalam inovasi ini, BUSAK merupakan akronim dari Tumbuh Sehat, Cerdas, dan Kreatif.

BUSAK PAUD merupakan inovasi dalam pemenuhan kebutuhan esensial anak dan kinerja guru berbasis teknologi. Hal ini didukung oleh inovasi lainnya yaitu Satu PAUD Dua Laptop. Laptop tersebut dapat digunakan untuk mengisi data pada aplikasi Busak PAUD. BUSAK PAUD dapat diakses oleh guru, kepala sekolah, orang tua, tenaga kesehatan, dan pihak berkepentingan lainnya melalui laman https://busakpaud.tanatidungkab.go.id/.

Sebelum dilakukannya inovasi BUSAK PAUD, guru dan orang tua belum memahami status pertumbuhan anak. Na-

mun melalui BUSAK PAUD, dapat memahami status pertumbuhan anak. Data tinggi badan dan berat badan anak yang diinput diaplikasi, maka aplikasi membaca status berat badan dan tinggi anak. Selain itu, sebelum dilakukan inovasi BUSAK PAUD, rendahnya kendali mutu atas aktivitas yang dilakukan kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan, menyebabkan rendahnya persentase satuan PAUD terakreditasi minimal B. Dengan adanya BUSAK PAUD, dapat memonitor aktivitas kepala sekolah dan guru. Laporan tersebut digunakan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut.

Sebagai contoh, guru yang mengirimkan rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran melalui BUSAK PAUD, maka Dinas Pendidikan dapat memetakan guru yang sudah memahami dan yang belum memahami terhadap tupoksi tersebut.

Guru yang masih mengalami keterbatasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen pembelajaran tersebut ditindaklanjuti dengan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggaran oleh Dinas atau pihak lainnya.

Aplikasi BUSAK PAUD juga memudahkan guru dan kepala sekolah dalam urusan administrasi. Jika sebelumnya dokumen harus diantar ke kantor dinas pendidikan, maka kini dokumen tersebut dapat dikirimkan melalui BUSAK PAUD pada menu laporan.

BUSAK PAUD turut berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting. Pada tahun 2022, prevalensi stunting di Tana Tidung mencapai 30,7% dan pada tahun 2023 menurun menjadi 15%. Penurunan prevalensi stunting Tana Tidung berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting Provinsi Kaltara tahun 2023. BUSAK PAUD juga berdampak dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD yang dinilai melalui akreditasi minimal B. dengan adanya laporan aktivitas guru dan kepala sekolah, maka dapat dilakukan kontrol dan pembinaan.









SI DITA DOTAGA
(STRATEGI DIGITALISASI DATABASE POTENSI PAJAK DAERAH DENGAN KOLABORASI INFORMASI GEOGRAFIS)

[**Inovator :** Martha Daring]

Pajak daerah sangat penting bagi pembangunan daerah karena pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah yang cukup, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat.

Selain itu, PAD bersumber dari pajak daerah yang cukup juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. SI DITA DOTAGA merupakan suatu *website* yang diluncurkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau.

Web SI DITA DOTAGA adalah strategi melibatkan pengumpulan dan analisis data tentang potensi pajak di Kabupaten Malinau dan kemudian menggunakan data tersebut untuk membuat peta yang dapat diakses oleh investor dan menyajikan informasi layanan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan daerah.

> *SI DITA DOTAGA merupakan panggilan atau sapaan dari suku Dayak Lundayeh kepada sosok wanita/perempuan yang memiliki postur tubuh tinggi dan cantik baik secara luar (fisik) dan dalam (inner beauty) yang memiliki karakter dan kecerdasan.*

Website SI DITA DOTAGA ini juga memiliki informasi peta yang dapat digunakan oleh investor untuk melihat lokasi yang memiliki potensi pajak tinggi, kondisi geografis, kepadatan penduduk, sebaran jenis usaha, status lahan dan untuk mengevaluasi peluang investasi di Kabupaten Malinau.

Sistem informasi SI DITA DOTAGA memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu organisasi. Tujuan sistem informasi SI DITA DOTAGA diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, menyediakan layanan informasi terkait peta informasi geografis objek pajak daerah, aset daerah, perijinan, UMKM, kesehatan, pertanian, perkebunan, pendidikan, pertambangan dan kehutanan.

Kedua, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengaduan serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan.

Ketiga, menyediakan informasi





pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan investor.

Dari ketiga tujuan tersebut menunjukkan bahwa pengguna perlu mempunyai akses menuju informasi pajak yang berkolaborasi dengan SIG (sistem Informasi Geografis) dan juga mengetahui bagaimana cara untuk bisa menggunakannya. Adapun aplikasi yang terdapat dalam *website* SI DITA DOTAGA antara lain SI KUMPAU, PBB, BPHTB, Peta Informasi Geografis dan Peta Potensi Wajib Pajak.

Pendataan Wajib pajak daerah merupakan kunci keberhasilan pengelolaan pajak daerah semakin lengkap data yang akurat makin mudah dalam rangka penentuan potensi target pajak daerah.

Dengan ada nya pendataan pajak dan retribusi daerah diharapkan terwujudnya kualitas data objek dan wajib pajak yang akurat, tersedianya peta potensi wajib pajak *by name by address* sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dan petugas dalam memberikan sumbangsih nyata dalam bentuk pajak dan retribusi daerah guna pembangunan di Bumi Intimung.

Dalam inovasi ini dilakukan perubahan pengelolaan data dan informasi yang semula masih tersebar dan belum terkelola dengan baik akan diubah menjadi terintegrasi berbasis teknologi informasi.

Inovasi tersebut akan memuat beberapa informasi untuk masyarakat antara data foto udara yang dapat menghasilkan potensi pajak daerah baik dari UMKM dan usaha, pendidikan, pertanian dan perkebunan, kesehatan yang terkait dengan pendonor darah yang tersebar di wilayah Kabupaten Malinau, aplikasi PBB, BPHTB, Sistem Informasi Hibah Daerah (SI MBAH), pelayanan informasi publik, dan kegiatan kekinian.

Bagi kalangan internal juga merupakan pengungkit agar data dan informasi dapat di *update* dengan tepat waktu. Selain itu data dan informasi yang ada selama ini akan menjadi tersentral di web SI DITA DOTAGA.

SI DITA DOTAGA merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat, investor, dan pemerintah daerah. Website ini dapat membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan pajak daerah di Kabupaten Malinau. *Website* SI DITA DOTAGA dapat diakses melalui Website: http://siditadotaga.id.





KEBUN RAYA: MASA DEPAN RUANG HIJAU, KONSERVASI DALAM EKSPANSI PEMBANGUNAN

[**Penulis :** Retno Sawitri Listyabratarini, S.T., M.PA[1]]

Sejak ditetapkan menjadi Ibukota Provinsi Kalimantan Utara melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, Tanjung Selor yang saat ini masih menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten Bulungan, mengalami perkembangan yang cukup masif.

Pembangunan yang masif sering kali membawa dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan jika tidak dilakukan dengan prinsip keberlanjutan. Perlu pengembangan elemen penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, kesehatan masyarakat, dan perekonomian kota.

Sistem ekologi yang sehat *(healthy ecosystem)* yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya dapat menjamin keberlangsungan kehidupan baik di lingkungan alami maupun terbangun dengan keberadaan ruang terbuka yang berperan penting dalam menyediakan jasa lingkungan *(ecosystem services)* sebagai ruang berfungsi ekologis, sosial budaya, resapan air, ekonomi, estetika serta fungsi lain seperti penanggulanganbencana.

Penyediaan ruang terbuka dengan beragam fungsi dan bentuknya perlu mempertimbangkan keterhubungannya dalam sistem ekologi yang utuh yang dapat melampaui batas administratif pemerintahan melalui pendekatan kawasan atau skala lansekap *(ecoregion)* untuk membangun jejaring hijau dan biru.

Komitmen pengembangan kawasan hijau dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan salah satunya melalui pengembangan Kebun Raya Bundayati. Kebun Raya Bundayati merupakan pusat konservasi tumbuhan di Tanjung Selor seluas 85,7 Ha yang diharapkan dapat mempertahankan biodiversitas Pulau Kalimantan.

Kebun raya tidak hanya menjadi ruang hijau di tengah kota, tetapi juga menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan berkelanjutan. Inisiasi penanaman 25 jenis buah hutan endemik Pulau Kalimantan seperti Lepiu dan Rambai telah dilakukan di Kebun Raya Bundayati sebagai salah satu cara pelestarian tanaman endemik yang saat ini sudah mulai langka.









Kebun Raya atau yang dikenal juga sebagai *botanic garden,* sejatinya merupakan kawasan yang didedikasikan untuk koleksi, penelitian, dan konservasi tumbuhan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya disebutkan bahwa Kebun Raya adalah Kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola tersebut. Selain untuk konservasi, Kebun raya memiliki fungsi penelitian, Pendidikan, wisata dan jasa lingkungan

Pengembangan Kebun Raya di Kalimantan termasuk di Tanjung Selor menjadi penting oleh beberapa sebab, yaitu :

Pertama, Kalimantan memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan spesies endemik banyak spesies tumbuhan di Kalimantan terancam punah akibat deforestasi dan alih fungsi lahan. Kebun raya dapat menjadi tempat perlindungan bagi spesies-spesies ini terutama bagi spesies langka yang sulit bertahan di habitat aslinya (konservasi ex situ);

Kedua, Menjadi tempat penelitian dan pengembangan spesies langka dan terancam punah, tanaman obat dan kayu berharga untuk farmasi dan bioteknologi; Ketiga, Pengembangan destinasi wisata alam untuk mendukung ekonomi lokal, mengurangi tekanan terhadap taman nasional dengan menyediakan alternatif wisata alam yang lebih terkendali;

dan terakhir lokasi Pendidikan lingkungan bagi masyarakat, pusat kampanye dan sosialisasi tentang isu-isu lingkungan, seperti perubahan iklim dan deforestasi.

Pengembangan Kebun Raya Bundayati dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2023. Kebun Raya Bundayati dibangun dalam tiga tahap dengan jangka waktu masing-masing tahap dengan periode lima tahun.

Di Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bulungan, mengalokasikan kurang lebih 30 Miliar yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) yang disalurkan kepada daerah penghasil sumber daya alam kehutanan, yang hanya boleh digunakan untuk melindungi dan merehabilitasi hutan dan lingkungan serta kegiatan lain terkait termasuk penataan Kebun Raya yang mengusung konsep Kawasan wisata, edukasi dan konservasi.



Tabel 1 Tantangan dan Strategi Pengelolaan Kebun Raya

Tantangan		Strategi Pengelolaan
Perubahan Iklim	**Dampak terhadap tanaman** Perubahan iklim dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup tanaman, terutama spesies yang sensitif terhadap suhu, kelembaban, atau curah hujan	Membuat database lengkap tentang koleksi tumbuhan, termasuk informasi tentang spesies, asal usul, status konservasi, dan kebutuhan perawatan.
	Adaptasi Kebun raya harus mengembangkan strategi untuk melindungi koleksi tanamannya dari cuaca ekstrem, seperti kekeringan, banjir, atau badai	Mengembangkan strategi adaptasi untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti menanam spesies yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.
Keterbatasan Sumber Daya	**Keterbatasan anggaran** Kebun raya sering kali menghadapi keterbatasan dana untuk pemeliharaan, penelitian, dan pengembangan fasilitas	Diversifikasi Pendanaan Kerjasama dengan Swasta: Membangun kemitraan dengan asyarakat swasta untuk mendapatkan dukungan finansial atau sponsor Program Adopsi Tanaman: Menawarkan program adopsi tanaman kepada masyarakat atau masyarakat, di mana mereka dapat berkontribusi secara finansial untuk perawatan tanaman tertentu Donasi dan *Crowdfunding:* Menerima donasi dari masyarakat atau mengadakan kampanye *crowdfunding* untuk proyek-proyek khusus.
	Kekurangan SDM Keterbatasan tenaga ahli, seperti botanis, ahli ekologi, dan staf edukasi, dapat menghambat pengelolaan kebun raya secara optimal.	Pelatihan dan Pengembangan Staf : Memberikan pelatihan rutin kepada staf tentang eknik konservasi, penelitian, dan pengelolaan kebun raya. Rekrutmen Ahli: Merekrut ahli botani, ekologi, dan bidang terkait untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kebun raya Volunteer Program: Melibatkan relawan dalam kegiatan kebun raya, seperti pemeliharaan tanaman atau program edukasi.
Invasi spesies asing	**Ancaman ekologis** Spesies tanaman atau hewan asing yang invasif dapat menggangu ekosistem alami kebun raya dan mengancam kelangsungan hidup spesies lokal	Memantau dan mengendalikan spesies asing yang dapat mengganggu ekosistem kebun raya.
	Pengendalian Membutuhkan upaya ekstra untuk mengidentifikasi dan mengendalikan spesies invasif.	
Tekanan urbanisasi	**Alih fungsi lahan** Lahan kebun raya yang berada di dekat perkotaan sering terancam oleh pembangunan infrastruktur atau pemukiman **Polusi** Polusi udara, air, dan suara dari aktivitas perkotaan dapat memengaruhi kesehatan tanaman dan pengalaman pengunjung	Perencanaan tata ruang yang berkelanjutan, memastikan Kebun Raya masuk dalam Kawasan hijau di RTRW Penguatan regulasi dan penegakan hukum dalam penataan ruang melalui penetapan peraturan zonasi,sanksi tegas dan perlindungan hukum terhadap Kebun Raya Peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memelihara Kebun Raya serta kampanye lingkungan Pemberian insentif dan disinsentif, Kolaborasi antar pemangku kepentingan dan Rehabilitasi dan restorasi
Pelestarian spesies langka	**Tantangan perawatan** Beberapa spesies tumbuhan langka membutuhkan perawatan khusus dan kondisi lingkungan yang sangat spesifik.	Fokus pada konservasi spesies tumbuhan langka dan terancam punah melalui program pembibitan, propagasi, dan reintroduksi ke habitat alaminya.

[1] Analis Peta Wilayah, Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara

Tantangan		Strategi Pengelolaan
	Reproduksi spesies Menjaga kelangsungan hidup spesies langka melalui pembibitan atau propagasi sering kali membutuhkan teknologi dan pengetahuan yang tinggi.	
Peningkatan jumlah pengunjung	**Kerusakan lingkungan** Kunjungan yang terlalu banyak dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan ekosistem kebun raya, terutama perilaku pengunjung dan sampah **Manajemen pengunjung** Diperlukan strategi untuk mengatur arus pengunjung tanpa mengurangi kenyamanan dan keamanan	Penerapan sistem kuota pengunjung. dengan menetapkan batas harian atau waktu kunjungan untuk menghindari kepadatan berlebihan. dan mengontrol jumlah pengunjung melalui pengembangan sistem reservasi Pembagian zona dan jalur wisata. Seperti penetapan zonasi area, pembuatan jalur lalu lintas pengunjung dan penetapan area terbatas Edukasi kesadaran pengunjung melalui papan informasi, panduan wisata dan kampanye sosial Peningkatan fasilitas dan infrastruktur, penyediaan fasilitas seperti tempat sampah, toilet, penambahan area istirahat agar pengunjung tidak merusak tanaman, penyediaan transportasi ramah lingkungan untuk mengurangi tekanan pada area tertentu. Memperketat pengawasan
Kurangnya kesadaran masyarakat	**Dukungan publik** Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kebun raya dapat mengurangi dukungan finansial atau politis	Memantau dan mengendalikan spesies asing yang dapat mengganggu ekosistem kebun raya.
	Edukasi Diperlukan upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran kebun raya dalam konservasi dan pendidikan	Menyediakan program edukasi untuk sekolah, mahasiswa, dan masyarakat umum tentang pentingnya keanekaragaman hayati dan konservasi alam
Penelitian dan Teknologi	**Keterbatasan fasilitas penelitian** Tidak semua kebun raya memiliki fasilitas laboratorium atau teknologi mutakhir untuk mendukung penelitian	Bekerja sama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi internasional untuk mengembangkan program penelitian botani, ekologi, dan bioteknologi.
	Kolaborasi Membutuhkan kerja sama dengan lembaga penelitian, universitas, atau organisasi internasional untuk mengembangkan program konservasi dan penelitian	
Pemeliharaan infrastruktur	**Usia fasilitas** Kebun raya yang sudah berusia tua sering kali menghadapi masalah pemeliharaan infrastruktur, seperti jalan setapak, rumah kaca, atau sistem irigasi **Biaya pemeliharaan** Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas membutuhkan biaya yang besar	Perencanaan dan desain infrastruktur yang berkelanjutan, Pemeliharaan fasilitas secara rutin dan berkala, Manajemen vegetasi dan lansekap,Pengelolaan air dan drainase, Pelibatan Masyarakat dan relawan dalam kegiatan pemeliharaan,Kolaborasi anggaran dan pendanaan dengan mitra Pembangunan

Tantangan		Strategi Pengelolaan
Regulasi dan kebijakan	**Dukungan Pemerintah** Kurangnya dukungan kebijakan atau regulasi dari pemerintah dapat menghambat pengembangan kebun raya	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Advokasi dengan Pemerintah: Bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mendukung konservasi dan pengembangan kebun raya. Perencanaan Jangka Panjang: Membuat rencana strategis jangka panjang yang mencakup tujuan konservasi, penelitian, dan pengembangan kebun raya.
Perubahan pola hidup masyarakat	**Kurangnya minat** Perubahan gaya hidup masyarakat modern, seperti ketergantungan pada teknologi, dapat mengurangi minat orang untuk mengunjungi kebun raya **Inovasi** Kebun raya perlu berinovasi untuk menarik minat generasi muda, misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital atau program interaktif.	Pengembangan Fasilitas Wisata: Menyediakan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung, seperti jalur interpretasi, area piknik, dan pusat informasi. Program Wisata Edukatif: Menawarkan paket wisata edukatif, seperti tur berpemandu, kelas botani, atau kegiatan alam lainnya. Event dan Festival: Mengadakan event khusus, seperti festival bunga atau pameran tanaman langka, untuk menarik lebih banyak pengunjung. Digitalisasi Koleksi: Membuat platform digital untuk mengakses informasi tentang koleksi tumbuhan, seperti aplikasi atau website. Program Interaktif: Mengembangkan program interaktif, seperti augmented reality (AR) atau virtual tour, untuk menarik minat generasi muda.
Bencana Alam	**Kerusakan fisik** Bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, atau kebakaran hutan dapat merusak fasilitas dan koleksi tanaman kebun raya **Pemulihan** Proses pemulihan setelah bencana membutuhkan waktu dan biaya yang besar	Pengelolaan Risiko dan Bencana Rencana Darurat: Menyiapkan rencana darurat untuk menghadapi bencana alam, seperti kebakaran, banjir, atau angin topan. Asuransi dan Perlindungan: Memastikan fasilitas dan koleksi tanaman dilindungi oleh asuransi yang memadai.

Dalam pelaksanaannya pengembangan Kebun Raya Bundayati mendapatkan pendampingan teknis dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Pengembangan Kebun Raya Bundayati direncanakan akan dibagi menjadi lima zona, yakni Zona Penerima, Zona Wisata dan Budaya, Zona Koleksi, Zona Pengelola, dan Zona Pengembangan.

Pembangunan Zona Penerima meliputi jalan masuk utama, gerbang utama, gerbang sekunder, gerbang tersier, gedung pusat informasi pengunjung (visitor information center/VIC), pos jaga, pergola, toilet, plaza penerima, dan fasilitas parkir kendaraan.

Pembangunan Zona Pengelola meliputi kantor pembibitan, perkerasan pembibitan, bangunan herbarium, bengkel, gudang peralatan, pos keamanan, kantor/warehouse, instalasi kompos, parkir area gudang.

Pembangunan Zona wisata berupa kawasan rumput, menara pandang, pembuatan kanal tahap dua, area outbond, amphitheater dan sarana pendukung wisata lainnya. Kemudian, pembangunan Zona Koleksi tematik tahap dua, berupa pengumpulan material koleksi, pendataan koleksi, serta penataan area.

Adapun Zona Pengelola berupa rumah pembibitan tahap dua, rumah paranet tahap tiga, dan perluasan area pembibitan, termasuk pembangunan prasarana dan sarana umum berupa sebagian jaringan jalan, gerbang sekunder dan tersier, jaringan irigasi (PDAM dan non-PDAM), jaringan listrik, jaringan drainase, serta sebagian site furniture pendukung wisata.

Pengelolaan kebun raya memiliki banyak tantangan, terutama karena kebun raya tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai pusat konservasi, penelitian, dan pendidikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan kebun raya, seperti yang termuat didalam tabel 1.

Di tengah pesatnya ekspansi pembangunan dan urbanisasi, keberadaan kebun raya menjadi semakin penting sebagai benteng terakhir pelestarian keanekaragaman hayati dan ruang hijau. Kebun raya tidak hanya menjadi tempat penyimpanan koleksi tumbuhan, tetapi juga simbol harmonisasi antara pembangunan dan konservasi.

Dengan koleksi tumbuhan yang terdokumentasi dan dikelola secara profesional, kebun raya menjadi “bank gen” yang menyimpan kekayaan flora untuk generasi mendatang. Perlu penerapan strategi pengelolaan yang inovatif dan integratif, agar kebun raya dapat tetap menjadi destinasi yang menarik dan edukatif tanpa mengorbankan kelestarian lingkungannya. Keseimbangan antara aksesibilitas dan konservasi adalah kunci utama dalam pengelolaan kebun raya yang berkelanjutan. (RSL)





AIR TERJUN BINUSAN

Wisata Menyejukkan di Nunukan

Berada di Kabupaten Nunukan, objek wisata ini dapat menjadi pilihan terbaik apabila Anda ingin menikmati suasana alam. Berada di daerah yang jauh dari perkotaan membuat kawasan air terjun ini bisa menjadi pilihan sebagai tempat untuk menyegarkan pikiran.

Air terjun ini memiliki keindahan alam yang memukau dan menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mengunjungi daerah ini. Suara gemericik air yang jatuh dari atas tebing memberikan suasana yang menenangkan dan menyejukkan. Selain itu, aliran air yang jernih dan segar membuat air terjun ini menjadi tempat yang sempurna untuk berenang dan mandi.

Untuk mencapai lokasi air terjun pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dan membutuhkan waktu sekitar 40 menit dengan jarak 22 km dari pusat kota Nunukan. Memiliki luas kawasan kurang lebih 74 hektar, kawasan wisata Air Terjun Binusan semakin ditingkatkan, dengan penambahan fasilitas sarana dan prasaran sebagai penunjang pariwisata. Diantaranya, 5 buah gazebo kayu, 2 menara pandang, plaza kuliner, panggung hiburan, souvenir shop, dan mushola.

Kemudian, para pengunjung yang membawa kendaraan tidak perlu khawatir. Sebab, akses masuk ke lokasi wisata sudah baik. Begitu juga bagi pengunjung yang gemar melakukan foto selfie. Karena banyak spot yang menarik.

Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga dapat melakukan kegiatan lain di sekitar air terjun. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan antara lain trekking di hutan sekitar, berkemah di area sekitar air terjun, atau berinteraksi dengan masyarakat setempat untuk belajar tentang kehidupan mereka.

Bagi pecinta fotografi, air terjun Binusan juga merupakan tempat yang sempurna untuk mengabadikan momen indah. Keindahan air terjun dan latar belakang hutan yang hijau akan memberikan hasil foto yang menakjubkan.

Terlepas dari banyaknya air terjun di Indonesia, Air Terjun Binusan mampu menghadirkan pesona yang tak tertandingi. Berbekal air yang sejuk dan udara yang bersih, tempat ini seolah menjadi surga tersembunyi yang memanjakan mata dan jiwa.

Pastikan anda juga berbagi momen indah Anda di sini di media sosial Anda, sehingga teman-teman Anda dapat merasakan keindahan ini. Air Terjun ini menjadi pilihan ideal untuk rekreasi



keluarga atau piknik bersama teman-teman, menawarkan nuansa alam yang asri dan fasilitas yang memadai.

Bagi pengunjung yang berencana menikmati keindahan Air Terjun Binusan, diharapkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Jangan lupa membawa baju ganti dan peralatan P3K untuk keperluan darurat.

Dengan pesona alamnya yang alami dan suasana hutan yang menenangkan, Air Terjun Binusan adalah pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin melarikan diri sejenak dari segala macam kesibukan. (AS)



BINUSAN



Foto : Unknown



TAMBANGAN

[**Penulis :** Ida Ayu Parlina[1]]

Hai, Peradi, warga Kaltara yang berbahagia. Hari ini adalah hari terakhir di bulan Februari 2025. Pukul 12 siang suasana di dermaga penyeberangan di samping taman *China Town* lebih ramai dari biasanya karena terjadinya penumpukan penumpang perahu tambangan di depan dermaga.

Antrian penumpang dengan sepeda motor berbaris hingga ke jalan raya. Calon penumpang tanpa sepeda motor menuju dermaga berjalan kaki di sela-sela antrian penumpang bersepeda motor dan menuruni jembatan besi yang menghubungkan antara dermaga dengan ponton atau tongkang, sebuah kotak besi besar berbentuk persegi yang terapung di atas air.

Di atas ponton telah siap empat sepeda motor dengan pengendaranya masing-masing, setelah penumpang menduduki bangku panjang di sisi kiri dan kanan dalam perahu, sepeda-sepeda motor pun diturunkan ke perahu satu per satu, dijejer melintang dari tengah perahu hingga ke haluan dengan pengendara sepeda motor masing-masing menunggangi kendaraannya.

Pemandangan orang menaiki motor di atas perahu adalah hal yang biasa. Untuk keamanan dan kenyamanan penumpang, jumlah sepeda motor yang dimuat ke perahu disesuaikan dengan kondisi dan ukuran perahu. Setiap perahu hanya diperkenankan membawa maksimal empat sepeda motor sekali jalan.

Ongkos sekali angkut sepeda motor dan pengemudinya dipatok sebesar sepuluh ribu rupiah, sedangkan untuk penumpang biasa sebesar lima ribu rupiah per orang. Penulis yang baru saja sampai di ujung antrian, mengurungkan niat untuk melewati rute air.



Lanting Jaman Hindia Belanda



Dermaga Jaman Hindia Belanda

Tiga orang pengendara lainnya yang baru tiba juga nampak memutar balik kendaraan mereka. Antrian yang sepadat itu bisa memakan waktu yang lama dan membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi, di tengah dominasi penumpang laki-laki yang memiliki kemampuan menurunkan sepeda motor masing-masing dari atas dermaga hingga masuk ke dalam perahu, apalah daya penulis yang masih membutuhkan







bantuan orang lain untuk melakukan hal tersebut.

Meskipun para tukang tambang selalu siap membantu, tapi jika dituruti bisa-bisa sampai matahari masuk ke peraduannya pun penulis belum tiba di rumah.

Ternyata perkiraan itu benar, dari cerita seorang kawan yang ikut mengantri hari itu penulis mendapat informasi bahwa dia berhasil mendapatkan giliran pada pukul 20.00 padahal dia sudah memasuki antrian sejak pukul 18.00! Suasana di dermaga yang ramai itu bukanlah pemandangan yang biasa terjadi.

Meningkatnya jumlah pengguna transportasi air disebabkan oleh ditutupnya akses bagi pengguna jembatan yang menghubungkan antara jalan Punas/ Bulu Perindu dan jalan poros Gunung Seriang.

Penutupan dilakukan karena adanya penyelesaian pekerjaan penanganan oprit dan pengamanan abutment jembatan, sehingga masyarakat yang biasanya memanfaatkan fasilitas jembatan tersebut untuk sementara beralih ke transportasi air.

Untuk masyarakat dari Tanjung Palas dan sekitarnya di seberang sungai Kayan, untuk sampai di Tanjung Selor terdapat empat alternatif yang tersedia. Pertama, menggunakan alat transportasi air berupa perahu kayu bermesin yang oleh masyarakat setempat disebut perahu tambangan.

Kata 'tambangan' berasal dari bahasa Melayu, yaitu 'tambang' yang berarti 'pangkalan tempat penumpang menyeberang dengan perahu (sampan)'. Perahu tambangan dikendalikan oleh seorang motoris yang disebut Tukang Tambang.

Jaman dulu tambangan merupakan alat transportasi umum satu-satunya. Sebelum adanya mesin penggerak, para tukang tambang tradisional menggunakan dayung. Seiring jaman, para tukang tambang menggunakan perahu bermesin ketinting hingga akhirnya mereka beralih ke mesin tempel yang laju dan suaranya pun tidak berisik.

Terdapat beberapa pelabuhan atau dermaga sebagai fasilitas transportasi air yang ada di Tanjung Selor. Pelabuhan Kayan I atau biasa disebut Pelabuhan Besar diperuntukkan bagi kapal-kapal besar dan speedboat milik instansi pemerintah, di pelabuhan itu juga ada dermaga VIP yang berbagi ponton dengan tambangan Hulu atau lebih dikenal dengan sebutan Tambangan Sentosa.

Pelabuhan Kayan II melayani transportasi speedboat Tanjung Selor – Tarakan, Bunyu dan Nunukan. Pelabuhan Kayan III melayani penumpang Tanjung Selor – Peso. Pelabuhan Kayan IV untuk rute Tanjung Selor – Teras dan Salimbatu.

Lalu ada Pelabuhan Kayan V atau lebih dikenal dengan nama Tambangan Toko Batu. Terakhir, ada Pelabuhan Kayan VI di Sabanar Lama yang difungsikan untuk bongkar muat kapal pengangkut barang.

Dua pelabuhan yang disebutkan di atas, yaitu Tambangan Sentosa/Tambangan Hulu di Kayan I dan Tambangan Toko Batu/Tambangan Hilir atau Kayan IV merupakan pelabuhan yang melayani transportasi penyeberangan Tanjung Selor – Tanjung Palas.

Pada masa kejayaan transportasi perahu tambangan, jumlah tukang tambang yang memiliki ijin dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bulungan sebanyak 47 orang/perahu. Kedua tambangan itu, terutama Tambangan Hilir sudah ramai oleh para penumpang sejak subuh hingga malam hari.

Para penumpang Tambangan Hilir selain masyarakat umum terdiri dari pedagang, pekerja kantoran dan pelajar.



Sedangkan Tambangan Hulu penumpangnya didominasi oleh PNS dan pelajar. Tambangan memiliki banyak cerita bagi para penggunanya dan tentunya bagi para tukang tambang yang telah begitu akrab dengan sungai Kayan.

Masa kejayaan tambangan mulai memudar bersamaan dengan adanya jembatan besi yang membentang di atas sungai Kayan yang pembangunannya dimulai pada tahun 1998. Jembatan itu memberikan alternatif bagi masyarakat untuk menggunakan alat transportasi darat selain alat transportasi air pada awal tahun 2000-an.

Kembali ke cara sampai ke Ibu Kota Kaltara dari seberang sungai, selain cara pertama yang menggunakan perahu, cara kedua adalah melewati jembatan sungai Kayan yang salah satu ujungnya berada di Kelurahan Tanjung Palas Hulu dan ujung lainnya berada di Desa Gunung Seriang.

Baru-baru ini berita tentang jembatan itu cukup viral di media sosial, setelah terjadinya insiden tertabraknya jembatan tersebut oleh kapal tongkang pengangkut batubara pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Akibat dari kecelakaan tersebut, Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara mengambil kebijakan pembatasan kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas 8 ton, diiringi dengan diterapkannya sistem buka tutup jalan atau penggunaan satu lajur demi keselamatan dan keamanan pengguna jembatan.

Bagi pengguna alternatif kedua itu, untuk mencapai Tanjung Selor dari Tanjung Palas, rute yang dilewati adalah jembatan Kayan menuju Kota Baru Mandiri, terus ke arah Jelarai melalui Kilometer 2. Pada masa itu, rute itu menjadi pilihan utama pengendara kendaraan roda empat.

Sedangkan pengendara kendaraan roda dua sebagian besar masih memilih menggunakan jasa tukang tambang untuk bolak balik Tanjung Selor – Tanjung Palas, disebabkan oleh jarak yang ditempuh cukup jauh, yaitu sekitar 20 KM jika dihitung dari pusat perkantoran di Tanjung Selor sampai ke ujung jembatan di Tanjung Palas.

Jalur alternatif ketiga muncul dengan adanya jembatan besi penghubung dari Gunung Seriang ke Punas dan jembatan kayu yang menghubungkan Kampung Bulu Perindu dan Kampung Arab.

Jalur alternatif baru itu disambut gembira oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor roda dua, karena jembatan kayu hasil swadaya masyarakat yang mulai dibangun pada bulan Juli 2017 itu dapat dilalui sepeda motor.

Jembatan kayu dua jalur itu menjadi akses penghubung Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Tanjung Palas yang termudah sekaligus terdekat. Pada masa itulah eksistensi perahu tambangan semakin meredup. Banyak tukang tambang yang menaikkan perahunya ke daratan dan beralih ke mata pencaharian lain.

Saat tulisan ini dibuat hanya tersisa 14 perahu/tukang tambang yang masih bertahan, dengan rincian 13 orang di Tambangan Hilir dan hanya 1 orang di Tambangan Hulu.

Satu-satunya tukang tambang yang masih setia di dermaga hulu yang sepi itu bernama Saiful Bahri. Beliau mulai menjalani profesi sebagai tukang tambang sejak tahun 2000. Rute keempat *how to get to* Tanjung Selor tersedia dengan diresmikannya penggunaan jembatan Meranti pada tahun 2019.

Meskipun saat awal dibuka kondisi jalannya buruk, berdebu saat panas dan berlumpur saat hujan, namun rute baru itu menjadi favorit semua pengguna jalan dengan berbagai jenis kendaraan. Dari kendaraan ringan hingga kendaraan berat. Saat ini, rute favorit ini sedang tidak bisa dilalui.

Dari surat pengumuman resmi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan yang beredar, diinformasikan bahwa jembatan ditutup hingga tanggal 19 Maret 2025. Semoga saja pekerjaan perbaikan jalan tersebut dapat selesai lebih cepat dengan hasil yang baik pula. Oke peradi, sekian dulu intermezzo kita. Semoga bermanfaat, sampai Jumpa!

[1] Pegiat Literasi

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

SELAMAT HARI KARTINI



Semoga semua perempuan Indonesia
bisa menjadi Kartini untuk dirinya dan sekitarnya

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa



SELAMAT HARI

OTONOMI DAERAH

25 APRIL 2025

Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara
Menuju Indonesia Emas 2045

bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id

SOCIAL MEDIA

FOLLOW US

BAPPEDA DAN LITBANG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



DAPATKAN INFORMASI TERBARU SEPUTAR PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

bappedalitbang_kaltara | bappedadanlitbangprov_kalimantanutara | bappeda&litbangprovkaltara | bappedalitbang_kaltaraprov.go.id